



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015--2019**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005--2025, dipandang perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015--2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015--2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 selanjutnya disebut Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun ke depan mulai dari tahun 2015.

Pasal 2

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 selengkapnya terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015--2019;
- b. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan anggaran tahunan;
- c. penyusunan Laporan Kinerja; dan
- d. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan sasaran strategis, maka Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 894

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pj. Kepala Biro Hukum,



Cecep Ahmed Feisal

BAB I **PENDAHULUAN**



1.1 Kondisi Umum

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai *leading sektor* di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Capaian Program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2014

Selama periode tahun 2010—2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika antara lain melalui penetapan kebijakan dan regulasi; pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; mendorong pemanfaatan yang produktif, sehat dan aman; diseminasi informasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

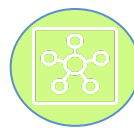
Kebijakan dan Regulasi



Kebijakan dan regulasi merupakan capaian strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai payung hukum pelaksanaan pos, komunikasi dan informatika. Dalam kurun waktu tahun 2010—2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan kebijakan dan regulasi sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
3. Kebijakan penataan pita frekuensi 2.1 GHz;
4. Kebijakan netral teknologi BWA 2.3 GHz;
5. Kebijakan penetapan besaran dan penggunaan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPFSR atau BHP Pita);
6. Kebijakan tentang acuan teknis standar perangkat pos dan informatika serta pelayanan sertifikasi perangkat pos dan informatika untuk semua perangkat yang beredar di wilayah Republik Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas



Dalam kurun waktu tahun 2010—2014 capaian terkait pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas adalah:

Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO)

Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi kesenjangan digital (*digital divide*)

Public Service Obligation (PSO) bidang pos untuk 2322 KPC LPU

khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan dan daerah yang secara ekonomi belum berkembang;

Merupakan penyediaan jasa pos sesuai yang dilakukan untuk kantor pos cabang layanan pos universal (KPC LPU). KPC LPU yang melaksanakan PSO bidang pos selama periode 2010—2014 rata-rata per tahun sebanyak 2.322 KPC LPU;

Penomoran kode pos di 11 wilayah perbatasan dan pulau terdepan

Dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pemberian kode pos melalui pembangunan tugu berkode pos. Sampai dengan tahun 2014 sudah dibangun tugu berkode pos di 11 wilayah perbatasan dan pulau terdepan Indonesia.

NIX di 19 ibukota provinsi dan IIX di 3 ibukota provinsi

Program ini merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses lokal maupun internasional. Tujuan Nusantara Internet Exchange (NIX) dan International Internet Exchange (IIX) adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dapat meningkatkan kualitas layanannya karena berkurangnya *latency*, meningkatkan kecepatan dan *quality of service (QOS)* dan berdampak pada pengurangan biaya operasional ISP/NAP. NIX dan IIX juga merupakan sarana filter konten, pengamanan jaringan, serta menjadi pendorong pertumbuhan konten melalui penyediaan sarana dan infrastruktur *web cache* dan *colocation* untuk penyelenggara telekomunikasi serta penyelenggara sistem transaksi elektronik. Sampai dengan tahun 2014, NIX telah dibangun di 33 ibukota provinsi (19 yang beroperasi), sedangkan IIX telah dibangun di 4 ibukota provinsi (3 yang beroperasi);

Palapa Ring di 362 Kab/ Kota

Jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang merupakan infrastruktur akses tetap pitalebar telah dibangun oleh PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) di 362 kabupaten/kota;

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Capaian terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurun waktu tahun 2010—2014 adalah:

Government Service Bus di 37 instansi Pemerintah

Sampai dengan tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan *Government Service Bus* (GSB-MANTRA) untuk 37 instansi pemerintah;

Pilot project e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP DIY

Sebagai upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun *pilot project* e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP di provinsi DI Yogyakarta;

Perlindungan masyarakat melalui PP No. 82 Tahun 2012

Perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana yang menjadi domain kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika terbatas dari sisi teknologi informasi yang diatur pada pasal 3 PP 82/2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik;

Indeks PeGI Nasional telah mencapai 2,8

Kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah telah dipetakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI) dengan tujuan agar dapat menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pemetaan kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah secara nasional digambarkan dalam bentuk indeks PeGI Nasional, dimana pada tahun 2014 indeks PeGI Nasional menggambarkan kondisi pemanfaatan TIK di instansi pemerintah sudah baik dengan nilai indeks 2,8;

Aplikasi e-Business untuk 300 UKM

Untuk meningkatkan peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah

memfasilitasi bantuan penyediaan infrastruktur maupun pembangunan *softskill*, dengan meningkatkan penggunaan aplikasi *e-bussiness* untuk UKM melalui pemanfaatan web log dan blog sebagai sebuah alternatif marketing channel dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki oleh para pelaku UKM. Sampai dengan tahun 2014, jumlah UKM yang telah menerapkan aplikasi *e-bussiness* sebanyak 300 UKM di seluruh Indonesia;

Trust+Positif telah memblokir 811.050 situs berkonten negatif

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengembangan sistem Trust+Positif untuk menyaring konten internet yang dapat digunakan masyarakat menuju internet sehat dan aman, yang dalam tahap ini menjadi acuan bagi pelayanan *internet service provider* (ISP). Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pemblokiran terhadap 811.050 situs dengan konten negatif;

Pemberdayaan 6.000 Relawan TIK

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberdayakan relawan TIK sebanyak 6.000 orang yang berasal dari seluruh elemen masyarakat yang ingin melakukan transformasi pemahaman TIK yang sehat untuk menuntaskan kesenjangan digital;

Pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah

Pemeringkatan keamanan informasi merupakan tindak lanjut dari penerapan indeks keamanan informasi. Pemeringkatan itu merupakan tahap awal kajian penerapan tata kelola keamanan informasi di Kementerian/Lembaga. Sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah;

Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC

Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC (*Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure/Coordination Center*) untuk pencegahan, pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan jaringan telekomunikasi serta penanganan insiden pada infrastruktur kritis. Pada tahun 2014 total data serangan yang tercatat oleh sistem pemantauan mencapai 48,4 juta serangan, dengan insiden

website yang tercatat sebanyak 12.088 insiden dan target terbanyak adalah domain.go.id sejumlah 3.288 insiden.

Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik



Advokasi pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mendorong pembentukan

Pembangunan Media Center

PPID di 34 kementerian, 129 lembaga negara, 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota;

Dalam rangka mendukung fungsi dan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *Government Public Relation/Humas* Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun pusat media (*media center*) di 171 lokasi.

200 KIM telah terbentuk di seluruh Indonesia

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi ke daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pascakonflik, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pasca konflik dengan jumlah 200 KIM di seluruh Indonesia.

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika



Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang komunikasi dan informatika sejumlah

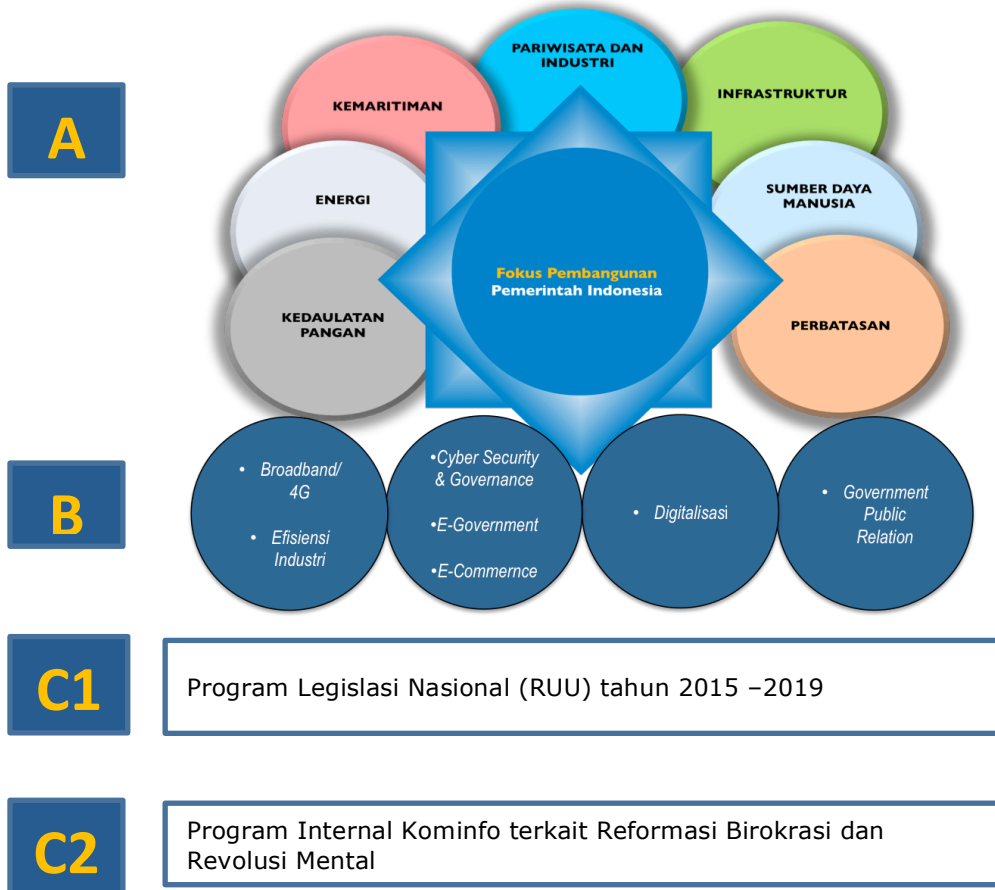
14 SKKNI, program beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri sejumlah 2.566 orang penerima beasiswa, serta pelaksanaan program pendidikan penyiaran dan multimedia dilaksanakan di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Sedangkan terkait penelitian, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghasilkan 204 karya riset dan penelitian yang telah diterbitkan dalam berbagai terbitan ilmiah.



1.2 Potensi dan Permasalahan

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara



A. Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia



Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015—2019, antara lain sebagai berikut:



1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia

Pemahaman tentang digital divide atau kesenjangan digital selalu dikaitkan dengan perbedaan antara akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang disebabkan karena ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK. Permasalahan kesenjangan digital di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung di berbagai daerah. Kendala serius yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.

2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi

Luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta

penggunaan satelit yang kurang optimal menyebabkan jangkauan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan *blank spot* di wilayah non-komersial. Kondisi ini perlu segera diatasi untuk memenuhi amanah Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring)

Palapa ring merupakan rencana pembangunan jaringan serat optik yang nantinya akan menjadi tulang punggung bagi telekomunikasi nasional, dengan tujuan menjangkau seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan Palapa Ring dibagi menjadi dua bagian, laut dan darat yang masing-masing memiliki panjang kabel (jaringan serat optik) 35.280 Km dan 21.807 Km yang meliputi 497 kabupaten/kota. Sampai saat ini masih terdapat 135 kabupaten/kota yang belum terjangkau jaringan infrastruktur serat optik nasional (Palapa Ring).

4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat Vs Turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan



Edelman Trust Barometer pada awal 2015 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan meningkat 16% (dari 49% di 2014, menjadi 65% di 2015). Kepercayaan publik harus diperhatikan dengan baik. Jika masyarakat tidak melihat perubahan yang berarti maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun dengan cepat.

Survei LSI Januari 2015 menunjukkan penurunan kinerja pemerintah dengan tiga rapor merah (hukum, ekonomi, politik) dan dua rapor biru (sosial, keamanan). Dibandingkan data survei Agustus 2014, harapan atas kinerja pemerintah pada Januari 2015 merosot (dari 71,73% menjadi 42,29%).

Dua data survei di atas menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan instansi yang berperan sebagai *Public Relation* (PR), untuk menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat dan antar instansi pemerintah. Selain itu PR juga berfungsi sebagai penyedia informasi yang akurat sehingga dapat menjaga citra pemerintah di mata masyarakat, dan masyarakat dapat

melihat kinerja positif pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan.

5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa



Visi Presiden tentang Revolusi Mental telah menjadi program nasional, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang apa dan bagaimana Revolusi Mental dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut terjadi karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Minimnya penyebarluasan konten informasi tentang Revolusi Mental yang dilakukan pemerintah telah menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk mendukung suksesnya program nasional Revolusi Mental. Terjadinya pergeseran karakter bangsa kearah negatif dan maraknya serbuan budaya asing tanpa disadari mulai menggerus budaya asli bangsa Indonesia.

Perlu ada gerakan perubahan untuk mengatasi hal ini. Oleh karena itu diperlukan revolusi mental untuk memperbaiki pola pikir masyarakat saat ini. Revolusi Mental merupakan upaya revitalisasi terhadap karakter dasar dari manusia Indonesia yang ramah, toleran, kekeluargaan, dan gotong royong.

Sedangkan tantangan dan potensi program USO yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi

Masyarakat di

187

Kecamatan (lokasi prioritas) di perbatasan



- Keterbatasan akses informasi
- Keterbatasan sarana dan prasana telekomunikasi dan penyiaran
- Mahalnya biaya komunikasi
- Sinyal telekomunikasi negara tetangga lebih kuat dari sinyal lokal

Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan, pada tahun 2015—2019 terdapat 187 lokasi prioritas di 39 kab/kota wilayah perbatasan yang akan dilakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Permasalahan yang perlu segera di atasi antara lain yaitu: masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap informasi (media audio visual dan cetak); masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap jaringan

telekomunikasi karena kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi; masih sulit dan mahal biaya komunikasi karena minimnya jumlah BTS yang dibangun (minim infrastruktur jalan, dan energi listrik); dan sinyal telekomunikasi dari negara tetangga lebih kuat dari sinyal telekomunikasi NKRI. Hal-hal tersebut telah menyebabkan: rentannya nasionalisme; kurangnya akses informasi masyarakat perbatasan tentang Indonesia sehingga mudah terpengaruh dan dapat menimbulkan gangguan terhadap keutuhan NKRI; dan tidak berkembangnya ekonomi daerah sehingga mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU

10.473

SMK dan SMU di seluruh Indonesia



- Memerlukan ketersediaan akses internet
- Pemberdayaan TIK melalui e-literasi
- Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM Bidang komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan menyebutkan 10.473 SMK dan SMU memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Sedangkan terkait peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan ToT Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan target 2015—2019 sebanyak 13.175 peserta.

3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian

5.232

BP3K



Memerlukan ketersediaan akses internet

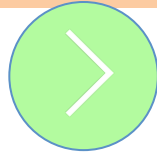
Sesuai dengan data yang di keluarkan oleh Kementerian Pertanian, terdapat 5.232 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mencari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik berocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi. Selain itu, petani juga dapat mengecek harga pasaran produk pertanian mereka

tanpa harus pergi ke kota. Dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat.

4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan

230.000

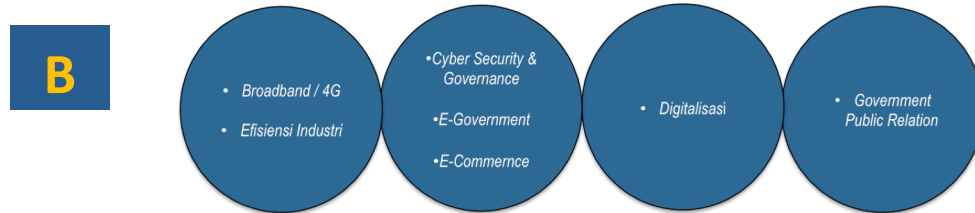
Nelayan dengan muatan perahu <30 GT



Belum dilengkapi dengan radio keselamatan ketika berada di tengah laut

Sesuai dengan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 230 ribu nelayan dengan muatan perahu kecil (<30 GT) yang belum dilengkapi radio keselamatan ketika berada di tengah laut.

B. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai *Leading Sector*



Potensi dan permasalahan yang penyelesaiannya merupakan prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika adalah:

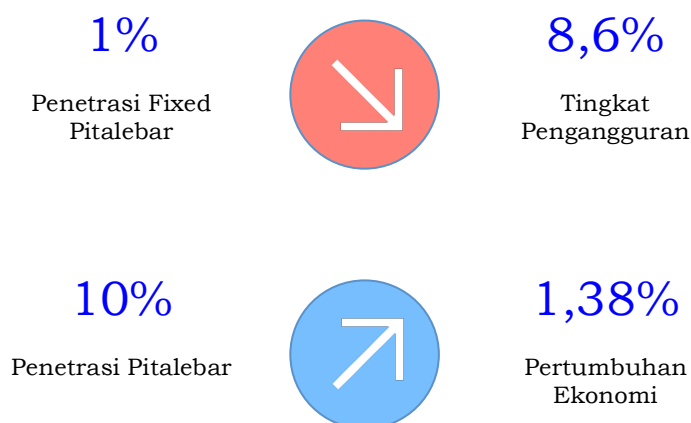
1. Masih Tingginya Harga Layanan Pitalebar

Kurangnya infrastruktur pitalebar dan belum optimalnya infrastruktur yang ada menyebabkan tingginya harga layanan pitalebar (*demand* lebih tinggi dari pada *supply*).

2. Potensi Kontribusi Pitalebar Terhadap Ekonomi



Harga layanan pitalebar di Indonesia masih 7,4% dari PDB perkapita. Sebagai perbandingan, harga layanan pitalebar di Negara maju tidak lebih dari 3% PDB perkapita masyarakatnya¹.

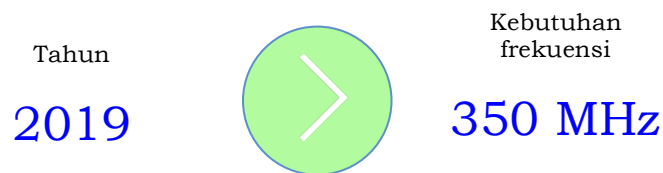


Pitalebar yang berkembang pesat dan berinteraksi dengan ekonomi saat ini memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi dan ruang lingkup pitalebar sebagai *enabler* bagi perubahan struktural ekonomi menjadi semakin besar efeknya terhadap

¹ Perpres 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia

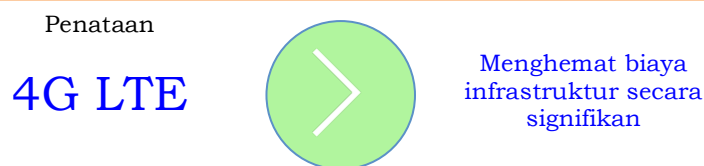
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mempengaruhi peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung pitalebar berasal dari dampak pada pendorong faktor pertumbuhan seperti inovasi, munculnya barang dan jasa baru, proses baru, model bisnis baru, dan meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi. Dengan adanya penetrasi fixed pitalebar sebanyak 1% menghasilkan penurunan pengangguran sejumlah 8,6%². Meningkatnya penetrasi pitalebar sebanyak 10% juga berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38%³.

3. Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang Terbatas



Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Diperkirakan pada tahun 2019 Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar⁴.

4. Potensi Pertumbuhan Layanan 4G LTE terhadap Peningkatan GDP, APBN dan Lapangan Kerja



Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menata spektrum frekuensi untuk keperluan layanan 4G *Long Term Evolution (LTE)*, penerapan teknologi 4G *LTE* diharapkan akan menghemat biaya infrastruktur secara signifikan. 4G *LTE* adalah teknologi yang diklaim sebagai jaringan nirkabel paling cepat pertumbuhannya dan didaulat untuk menggantikan *High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)*. Nantinya 4G *LTE* diharapkan beroperasi di frekuensi 700 Mhz yang memiliki jangkauan lebih luas dari frekuensi yang lain (2100, 2300, dsb).



Adanya akses yang lebih cepat berdampak pada peningkatan *Gross Domestic Product (GDP)* masyarakat, peningkatan Anggaran

² Katz. el. Al (2009)

³ World Bank

⁴ Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meningkatkan lapangan kerja.

5. Potensi Kehilangan Hak Penggunaan Slot Orbit



- Ruang angkasa termasuk orbit satelit geostasioner (GSO) tidak dapat dijadikan kepemilikan oleh negara
- Indonesia dapat kehilangan hak menggunakan orbit satelit (Filling Satelit) yang didaftarkan ke ITU jika tidak menggunakan dan tidak ada fisik

Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadikan fungsi satelit sangat vital dan strategis dalam membangun konektivitas nasional, karena satelit dapat menjangkau wilayah Indonesia yang belum terdapat infrastruktur telekomunikasi. Pemanfaatan satelit diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan aktivitas sektor telekomunikasi, ekonomi, dan pertahanan.

6. Belum Terjangkaunya Seluruh Wilayah Indonesia dengan Jaringan Infrastruktur Pitalebar (Palapa Ring)

135

Kab/Kota



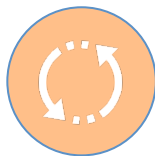
Belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar

Palapa Ring merupakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi inisiatif pemerintah dan swasta berupa pembangunan serat optik di seluruh wilayah Indonesia yang menjangkau 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Proyek ini terdiri atas tujuh lingkaran kecil serat optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Melalui Palapa Ring diharapkan seluruh Indonesia terhubung dengan layanan pitalebar. Namun saat ini, 135 kabupaten/kota belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar⁵.

7. Belum Optimalnya Pemanfaatan NIX

19

NIX



Belum dimanfaatkan secara optimal

NIX adalah tempat secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data. Tujuan pembangunan NIX adalah agar para

⁵ RPJMN 2015-2019

penyelenggara telekomunikasi dan pengguna layanan internet dapat mengakses internet menjadi lebih cepat, berkualitas, dan tarif layanan yang terjangkau (mengurangi biaya trafik nasional dan internasional sampai ke wilayah pelayanan universal telekomunikasi), sehingga industri konten nasional dapat tumbuh dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada periode 2010—2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun NIX di 33 provinsi, namun baru 19 NIX yang beroperasi.

8. Tingginya Tingkat Persaingan Antar Penyelenggara Telekomunikasi dan Rendahnya Kualitas Layanan

Saat ini industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan yang tinggi, terlebih terjadi persaingan harga antar operator dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi. Namun, persaingan harga tersebut tidak diikuti dengan kualitas layanan yang baik, dimana harga layanan pitalebar masih di atas 5% dari UMR.

9. Belum Efisiennya Infrastruktur Telekomunikasi Nasional

Infrastruktur
Telekomunikasi



Belum Efisien



Pendapatan sektor
telekomunikasi tidak
terdistribusi ke daerah-
daerah

Tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional menyebabkan penetrasi pitalebar berjalan lambat karena para penyelenggara telekomunikasi hanya fokus membangun di daerah yang layak secara komersial, sehingga pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi merata ke daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia.

10. Belum Efisiennya Proses Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Permohonan penggunaan spektrum frekuensi radio (Izin Stasiun Radio/ISR) yang dilakukan manual ditemukan banyak kendala antara lain, permohonan ISR melalui jasa perposan sering kali banyak diterima setelah Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Slot Orbit Satelit (Unit Pelayanan Teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika) melakukan penertiban, data permohonan ISR melalui jasa perposan sering tidak lengkap atau

tidak jelas, terlambatnya penerbitan ISR, pendistribusian ISR melalui jasa pos ke UPT perlu waktu lama, kesalahan dalam pengiriman ISR. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah proses perizinan yang panjang berdampak kepada lama waktu proses permohonan ISR yang membutuhkan waktu maksimal 14 hari.

11. Masih Rendahnya TKDN di Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beredar di Indonesia



- Salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia
- Hilangnya potensi penciptaan lapangan pekerjaan karena produksi alat dan perangkat telekomunikasi di luar negeri

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerapkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat dan perangkat telekomunikasi sebesar 20% untuk *Subscriber Station* (SS) dan 30% pada *Base Station* (BS). Masih kecilnya TKDN yang dipersyaratkan menyebabkan masih bergantungnya Indonesia terhadap impor alat dan perangkat telekomunikasi karena hanya sebagian kecil alat dan perangkat telekomunikasi yang sudah diproduksi di dalam negeri. Pada tahun 2014, impor alat dan perangkat telekomunikasi mencapai Rp 67 triliun⁶ hal ini menjadi salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia dan hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja dikarenakan produksi alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan di luar negeri. Dampak positif kebijakan TKDN adalah: kemandirian pengembangan teknologi telekomunikasi; peningkatan produk dalam negeri; pemicu peluang usaha industri kreatif; keberpihakan negara kepada industri telekomunikasi dalam negeri.

⁶ BPS (2014)

12. Belum Terintegrasinya Nomor Panggilan Darurat

Nomor panggilan darurat belum terintegrasi



Kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat yang harus dihubungi

Tidak terintegrasi dan kurangnya sosialisasi nomor panggilan darurat di Indonesia telah menyebabkan kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat mana yang harus dihubungi ketika terjadi kondisi darurat. Saat ini terdapat beberapa nomor panggilan darurat yang di layani oleh instansi yang berbeda seperti 110 untuk bantuan kepolisian, 118 untuk ambulans, 113 untuk pemadam kebakaran, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan penataan dan integrasi nomor panggilan darurat menjadi nomor panggilan tunggal darurat yang dapat menjawab semua panggilan darurat yang sering dibutuhkan oleh masyarakat.

13. Maraknya Spam, Fraud, dan Kasus Penyalahgunaan Refilling Traffik Terminasi Internasional



1,2 T

Kerugian operator telekomunikasi akibat Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI)

Banyaknya simcard prabayar yang beredar saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah berganti nomor. Kemudahan untuk mendapatkan nomor dengan harga murah dewasa ini dimanfaatkan pengguna layanan dan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyebarkan informasi. Bukan hanya menyebarkan informasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi juga membanjiri *inbox* dengan mengirimkan pesan yang berisi promo tentang produk atau program yang sedang diadakan (*spam*). Pengguna layanan yang tidak bertanggung jawab pun kerap melakukan penipuan melalui sms tanpa terdeteksi identitasnya. Selain itu, penggunaan Sim Box untuk merekayasa sambungan internasional yang seharusnya menggunakan tarif internasional juga menjadi tarif lokal. Kasus penyalahgunaan Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI) ini, menyebabkan kerugian pihak penyelenggara layanan telekomunikasi hingga mencapai Rp 1,2 triliun per tahun⁷.

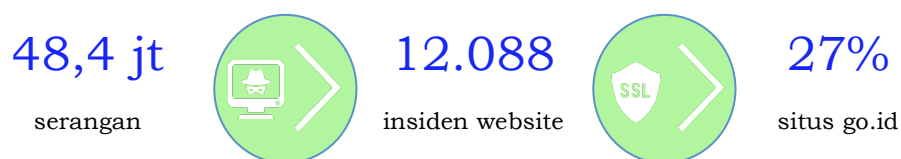
⁷ Dit Pengendalian, Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika

14. Maraknya Perangkat Telekomunikasi Seluler Ilegal



Demand terhadap perangkat telekomunikasi seluler yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan maraknya perangkat ilegal di Indonesia, karena konsumen menginginkan perangkat terbaru dengan harga murah. Setiap tahun beredar lebih dari 10 juta unit perangkat telekomunikasi seluler ilegal, dengan transaksi industri ponsel per tahun mencapai Rp 50 triliun, dan diperkirakan sebanyak Rp 5 triliun⁸ dari pendapatan negara berpotensi hilang (PPN) akibat adanya perangkat telekomunikasi seluler ilegal. Oleh karena itu diperlukan registrasi IMEI (*International Mobile-station Equipment Identity*).

15. Banyaknya Serangan di Dunia Maya (Termasuk Situs Pemerintah)



Cyber security diartikan sebagai keamanan informasi yang diaplikasikan pada komputer dan jaringannya. Cyber security bertujuan untuk membantu user untuk mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan informasi merupakan isu yang penting mengingat pada tahun 2014 terdapat 48,4 juta serangan di dunia maya dan situs yang paling banyak diserang adalah situs yang memiliki domain go.id⁹.

16. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah

E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan

⁸ APSI

⁹ ID SIRTII

lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan *e-government* antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional¹⁰.

17. Makin Diminatinya Transaksi Jual Beli melalui Internet



Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia yang mencapai 73 juta pengguna dimana 7%-nya melakukan transaksi jual-beli melalui internet¹¹. Hal ini mendorong terciptanya *e-commerce* yang makin diminati oleh masyarakat Indonesia. *E-commerce* sendiri diartikan sebagai proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer dan internet sebagai perantara transaksi bisnis¹². Pada tahun 2014, nilai transaksi e-commerce mencapai \$12 miliar atau Rp 150 triliun. Mengingat banyaknya peminat dan pemain dalam bidang ini, pemerintah menetapkan target untuk transaksi sampai dengan tahun 2016 mencapai \$24 miliar atau Rp 300 triliun.

18. Maraknya Konten Ilegal, Berbahaya, dan *Malware*



Maraknya konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah

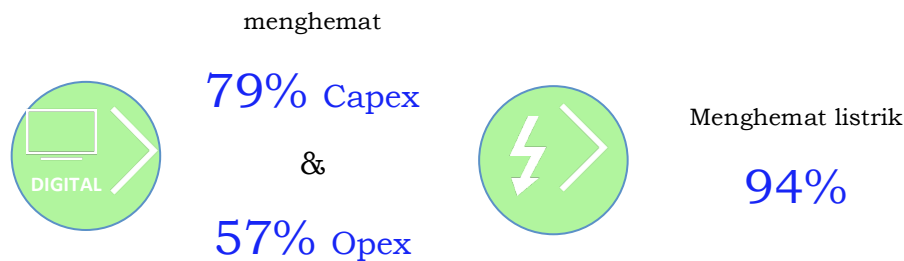
¹⁰ RPJMN 2015-2019

¹¹ Menkominfo, kominfo.go.id

¹² Laudon & Laudon 1998

harus hadir dalam upaya penanganan konten ilegal tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional.

19. Digitalisasi Penyiaran TV Berpotensi Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi, Infrastruktur Industri Penyiaran dan Membuka Peluang Usaha Baru



International Telecommunication Union (ITU) atau otoritas telekomunikasi internasional pada tahun 2006 batas akhir kepada seluruh negara di dunia agar paling lambat 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran digital. Namun sebelumnya telah dilakukan uji coba di tahun 2006 yang hasilnya menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran yang akan diadopsi di Indonesia¹³.

Penyiaran TV Digital dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi; efisiensi infrastruktur industri penyiaran; dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten. Selain itu penerapan TV digital juga akan menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal (*Capital Expenditure*) sebesar 79% dan biaya operasional (*Operational Expenditure*) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog. Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV Digital juga meningkatkan kualitas penerimaan siaran bahkan dengan definisi tinggi (*High Definition TV*).

Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penerapan TV digital namun masih menemui kendala antara lain:

- a. Implementasi migrasi siaran TV Analog ke Digital (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah kebawah, khususnya bagi lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Karena dengan diberlakukannya digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPPM).

¹³ Kominfo, 2012:1

- b. Implementasi digitalisasi sistem penyiaran harus didasari regulasi yang kuat di level undang-undang sedangkan Indonesia belum memilikinya
- c. Belum diaturnya pengawasan sistem digital dan sanksi terhadap pelanggaran konten (program siaran)

C1. Program Legislasi Nasional

Potensi dan permasalahan terkait dengan regulasi bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Revisi UU ITE Terkait Pencemaran Nama Baik, serta Berbagai Hal Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

Semakin bertambahnya pengguna Internet, termasuk makin besarnya jumlah penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi internet, adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya. UU No. 11 Tahun 2008 yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangan. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.

2. Perlunya Revisi UU Penyiaran Terkait Industri Penyiaran yang Sehat dan Sesuai dengan Karakter Bangsa

Demokratisasi penyiaran saat ini belum terwujud. Media penyiaran di Indonesia saat ini dapat memberikan pengaruh dalam membangun kesan/opini publik dan sangat dipengaruhi kepentingan bisnis dan politik pemiliknya. Berbagai acara/siaran yang mengudara tidak berdasarkan pada kriteria kelayakan sebuah siaran. Kegiatan penyiaran diarahkan untuk menarik iklan dan menentukan kelayakan acara tersebut melalui selera pasar dan rating. Banyaknya tayangan berbau mistis, pornografi dan pornoaksi, infotainment, serta reality show merupakan salah satu dampak dari dominannya pertimbangan pasar dalam

menentukan materi siaran. Media penyiaran (terutama televisi) bersaing ketat dalam meraih pemirsa melalui rating dan share. Dengan adanya rating dan share sebagai acuan dalam penyusunan agenda, maka program televisi cenderung memuat konten yang kurang edukatif dan mengutamakan unsur hiburan. Bahkan program berita yang seharusnya mengedepankan aspek idealisme ikut menentukan rating dan share, hingga mendorong media untuk memodifikasi berita-berita agar lebih menghibur untuk kepentingan menarik segmen pemirsa sebanyak-banyaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pers dan media penyiaran belum seimbang, obyektif dan selektif dalam menyampaikan informasinya kepada masyarakat.

Selain itu Indonesia juga menghadapi permasalahan tren monopoli atau penguasaan media massa oleh kelompok pemilik modal tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur penyelenggaraan industri penyiaran yang sehat, serta konten siaran yang sesuai dengan karakter bangsa.

3. Perlunya RUU RTRI Terkait Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik

UU Penyiaran maupun Peraturan Pemerintah dianggap belum dapat mengakomodir kebutuhan lembaga penyiaran publik dalam menjawab perkembangan dan tantangan dengan lembaga penyiaran yang lain. Bentuk kelembagaan LPP RRI dan LPP TVRI sebagai badan hukum dianggap tidak jelas sehingga mengalami kesulitan dalam dukungan APBN. Adanya pandangan tentang pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang masih menggunakan mata anggaran 99 yang merupakan mata anggaran lain-lain sehingga tidak ada kewenangan bagi LPP RRI dan LPP TVRI untuk mengelola anggaran secara tersendiri mengingat LPP RRI dan LPP TVRI bukan merupakan satuan kerja secara tersendiri. Manajemen Dewan LPP RRI dan LPP TVRI dirasakan sangat dominan dalam pengelolaan LPP RRI dan LPP TVRI serta lemah dalam mewakili kepentingan publik. Adanya fenomena Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak ditindaklanjuti dengan peraturan mengenai kepegawaian di lingkungan LPP RRI dan LPP TVRI sehingga sudah lebih dari 15 tahun belum dapat melakukan recruitment SDM kreatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa alasan yang menyatakan bahwa LPP RRI dan LPP TVRI harus dikeluarkan dari substansi dalam UU Penyiaran dan disusun undang-undang yang mengatur tentang penggabungan antara LPP RRI dan LPP TVRI yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI).

4. Perlunya Regulasi Perlindungan Data Pribadi; Migrasi Analog ke Digital; Konvergensi Telematika (Telekomunikasi); dan Pos

Urgensi penyusunan RUU Perlindungan Data dan informasi Pribadi adalah karena perlunya kepastian hukum perlindungan data pribadi sebagai wujud penegakan hak asasi manusia, perlunya penegasan hak subjek data atas pengelolaan data pribadi, serta sebagai upaya menciptakan *good governance* dan *clean government*.

Urgensi penyusunan RUU Migrasi Televisi Terrestrial dari Analog ke Digital adalah untuk mengatur spesifik terkait migrasi penyelenggaraan penyiaran analog ke digital, dan sebagai payung hukum *analog switch off*.

Urgensi penyusunan RUU Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi) adalah karena pesatnya perkembangan TIK yang menuntut pembaruan pola pikir pada kebijakan tersebut.

Urgensi penyusunan Revisi UU Pos adalah untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pos, dan pelaksanaan pelayanan pos universal (menghadapi pembukaan akses pasar).

C2. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

Potensi dan permasalahan terkait program internal Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai reformasi birokrasi dan revolusi mental adalah:

1. Transformasi Birokrasi Belum Terwujud Secara Nyata

Perubahan yang signifikan telah terjadi dalam tatanan pemerintahan. Pemerintah tidak saja harus mau dan bisa menerima kritik dan tuntutan tugas oleh reformasi, dengan pemangkasan wewenang dan berbagai tugas baru yang mana dalam hal ini pemerintah benar-benar harus melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan juga pemerintahan yang bersih (*clean government*), yang dalam pencapaiannya harus ada perubahan mendasar mencakup kelembagaan, sistem kerja, dan bahkan *mind-set* para pelakunya mulai dari pejabat tinggi sampai ke pegawai (bawahan). Salah satu penyebab belum terwujudnya reformasi karena transformasi birokrasi belum terwujud secara riil. Reformasi total tidak akan terjadi sebelum dilakukan perbaikan kinerja birokrasi. Namun, perbaikan kinerja tersebut tidaklah cukup dilakukan secara *Ad-*

hoc atau parsial. Maka dari itu, konsep “*change management*” harus dipikirkan sebagai usaha mereformasi birokrasi secara mendasar, sehingga meningkatkan kinerja organisasi dan individu.

Pemikiran tentang *good governance* sebagai paradigma baru manajemen pembangunan menjadikan pemerintah sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa melalui kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta peran perencanaan dan penganggaran. Dalam *good governance*, tidak lagi hanya pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat berperan dalam pemerintahan, sehingga masyarakat akan terlibat untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap seluruh tindakan pemerintah.

2. Belum Adanya Riset Mengenai Dampak Sosial Ekonomi Terkait Implementasi Pitalebar Dalam Rangka Mempersiapkan Tenaga Kerja

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah belum adanya riset mengenai dampak sosial dan ekonomi atas perkembangan TIK khususnya pitalebar untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan TIK khususnya pitalebar.

Ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014—2019, bertujuan untuk memberikan arah dan panduan bagi perluasan, percepatan, pembangunan pitalebar nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Dengan dimulainya pembangunan pitalebar Indonesia, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah persiapan antara lain dengan melakukan kajian tentang kesiapan SDM angkatan kerja dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi ancaman (jika ada) dari agenda rencana pembangunan pitalebar Indonesia.

3. Perubahan Paradigma Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan internal yang selama ini dilakukan masih menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat *watchdog* (*mengungkap temuan*), reaktif, post-audit, korektif, kaku, dan pasif sudah tidak relevan dilakukan, karena yang seharusnya dihindari adalah adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, sehingga diperlukan suatu paradigma baru dalam mekanisme pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN



2.1 Rumusan

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015—2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.



2.2 Rumusan Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi

- dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
 3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
 4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
 5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
 6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
 7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



2.3 Tujuan

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.



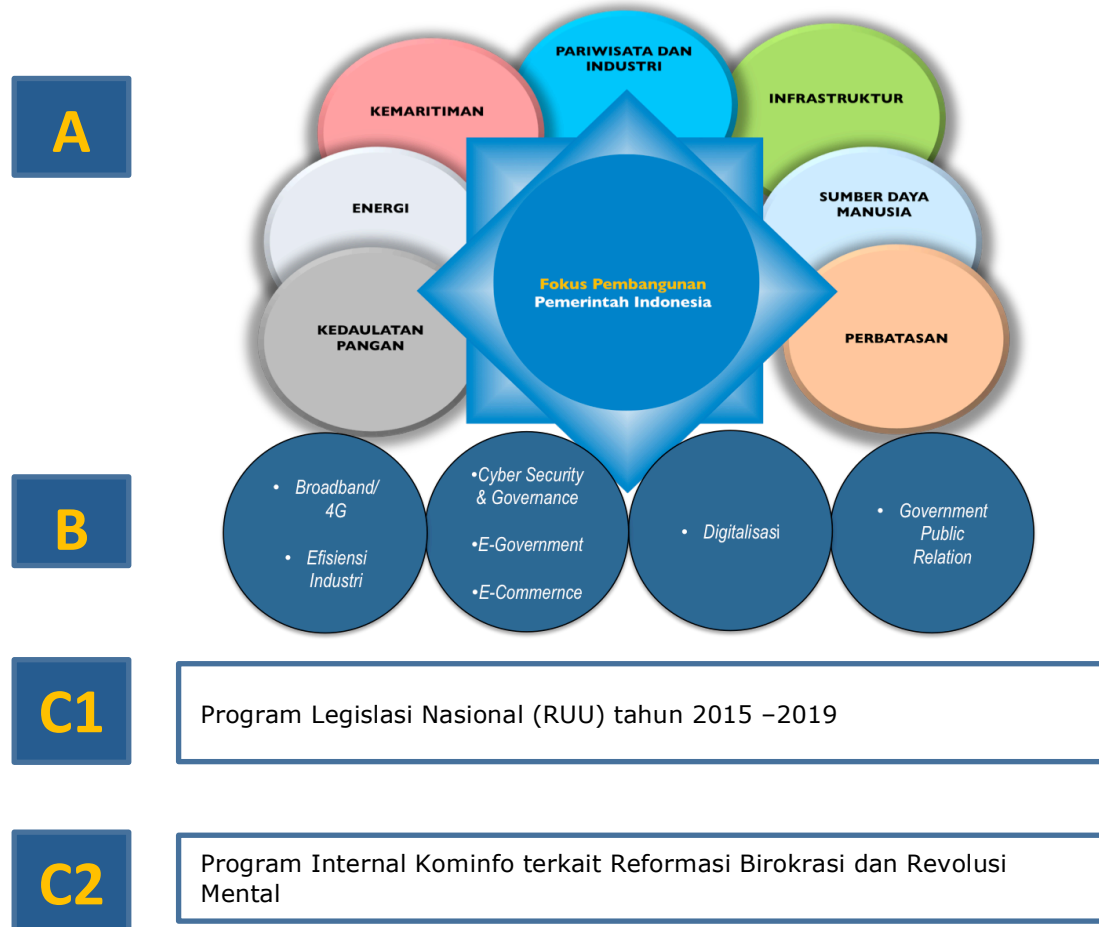
2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

- A. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan
- B. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
- C. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
- D. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara



Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

- SS.1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- SS.3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- SS.4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia harus menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, negara harus mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumberdaya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya. Informasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan sumber daya pitalebar (*bandwidth*) akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sesuai dengan alam dan budayanya sehingga menjadi kekayaan yang sangat berharga. Pengetahuan itu dapat menjadi landasan dan berkontribusi bagi pembangunan berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, dan pendidikan. Dengan arah kebijakan yang tepat, bidang komunikasi dan informatika akan berperan dalam mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang berdikari dan berdaya saing tinggi.

Sasaran lain dalam pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data nasional sebagai kekayaan strategis bangsa. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional, dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Itulah yang menjadi salah satu hal penting dari sembilan agenda prioritas atau Nawacita pemerintah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%.

Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda

prioritas yang disebut Nawacita yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan RPJMN Tahun 2015—2019, yaitu:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa;
9. memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas pemerintah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada tiga agenda prioritas. Ketiga agenda tersebut adalah Nawacita-2, Nawacita-3 dan Nawacita-6.

NAWACITA-2: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dalam RPJMN Tahun 2015—2019 disusun ke dalam 5 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :

1. melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
3. membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
4. menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN); dan
5. meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 3), 4) dan 5).

Sub Agenda 3 Nawacita-2: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3. Penerapan open e government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kedalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

Sub Agenda 4 Nawacita-2: Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan

penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Sub Agenda 5 Nawacita-2: Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik

Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya open government pada seluruh instansi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain:

1. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;

- j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP);
 - k. Dewan Pers; dan
 - l. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

NAWACITA-3: Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015—2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan diberbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut ditempuh strategi pembangunan antara lain :

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi-informasi.
2. Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara

NAWACITA-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, di RPJMN Tahun 2015—2019 disusun ke dalam 11 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :

1. membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
2. membangun transportasi umum masal perkotaan;
3. membangun perumahan dan kawasan pemukiman;
4. peningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur;
5. penguatan investasi;
6. mendorong BUMN menjadi agen pembangunan;
7. peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi;
8. akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional;
9. pengembangan kapasitas perdagangan nasional;
10. peningkatan daya saing tenaga kerja; dan
11. peningkatan kualitas data dan informasi statistik dalam sensus ekonomi tahun 2016.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 1).

Sub Agenda 1 Nawacita-6: Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan

Beberapa sasaran yang ingin diwujudkan untuk membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya melalui, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO;

2. tersedianya layanan pitalebar dengan tujuan:
 - a. terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota;
 - b. tingkat penetrasi *fixed pitalebar* di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi; dan
 - c. tingkat penetrasi *mobile pitalebar* (1 Mbps) di perkotaan 100 persen dan di perdesaan 52 persen.
3. pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui:
 - a. migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai (*analog switch off*); dan
 - b. tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pitalebar.
4. tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75 persen; dan
5. tersedianya layanan *e-Government* dan dikelolanya data sebagai asset strategis nasional melalui:
 - a. indeks *e-Government* nasional mencapai 3,4 (skala 4,0); dan
 - b. jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen.

Dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

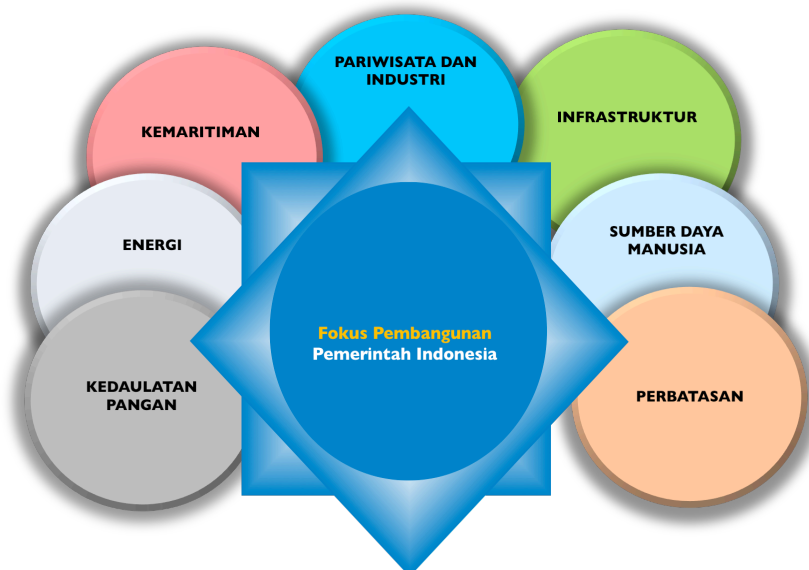
1. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi *pitalebar-ready* dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui:
 - a. Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (spektrum refarming) dengan prinsip netralitas teknologi;
 - b. Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN);
 - c. Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan;
 - d. Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - e. Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi *pitalebar*;

- f. Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: *spektrum sharing, spektrum consolidation, mobile virtual network operator (MVNO)*;
 - g. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industry satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan
 - h. Mengkaji pembangunan satelit *pitalebar* nasional;
3. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui:
- a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika

A. Program Kominfo yang Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia



1. Mewujudkan Konektivitas Pitalebar Nasional

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan konektivitas pitalebar nasional adalah:

Terkait Universal Service Obligation (USO):

- a. Redesain USO
 - Menyusun bisnis model redesain
 - Menetapkan permen tentang redesain USO
- b. Penyelenggaraan 3 pilot sistem desa pitalebar terpadu di desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman sesuai 50 lokasi prioritas BNPP
- c. Penyelenggaraan sistem desa pitalebar terpadu (desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman) di 50 lokasi prioritas BNPP
- d. Membangun 575 BTS di daerah tertinggal, terluar dan terpencil
- e. Menyediakan akses internet di 4000 lokasi (sesuai prioritas, seperti 100% sekolah SD-SMA termasuk madrasah)
- f. Revitalisasi dan optimalisasi National Internet Exchange (NIX)

Non-Universal Service Obligation (Non-USO):

- a. Design TIK environment sebagai acuan di area fokus pembangunan
- b. Koordinasi lokasi prioritas dengan K/L terkait dengan penyelenggara telekomunikasi
- c. Membuat kebijakan yang memberikan insentif kepada operator untuk memusatkan pengembangannya ke lokpri sektor unggulan sesuai model
- d. Memfasilitasi dan memonitor implementasi
- e. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) ke 1000 desa
- f. Pembentukan 1500 agen perubahan Internet Cerdas, Kreatif, dan Produktif (i-CAKAP) di daerah perbatasan, tertinggal, dan terluar.

2. Mewujudkan Pemerintah sebagai Government Publik Relation (GPR)

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan kebijakan pemerintah sebagai GPR adalah:

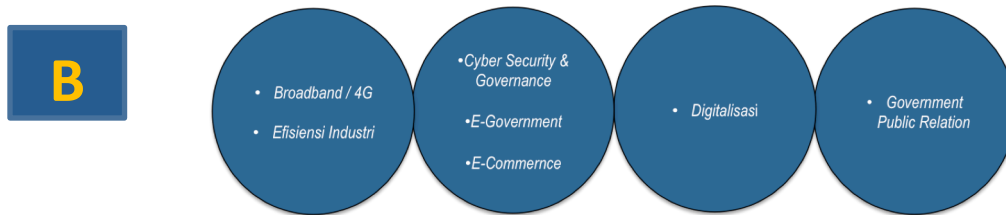
- a. Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya
- b. Membentuk lembaga jejaring komunikasi
- c. Menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh K/L/D
- d. Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia

3. Mendukung Revolusi Mental

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung revolusi mental adalah:

- a. Menyusun strategi komunikasi dalam rangka efektifitas diseminasi informasi tentang revolusi mental
- b. Diseminasi informasi ke seluruh pelosok Indonesia terkait revolusi mental
- c. Edukasi dan advokasi kepada K/L/D, ormas, dan media mengenai revolusi mental

B. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai *Leading Sector*



1. Pengembangan Infrastruktur Pitallebar termasuk Layanan 4G

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pengembangan infrastruktur pitallebar termasuk layanan 4G adalah:

- a. Menata Sumber Daya spektrum frekuensi radio
- b. Menjaga keberlangsungan orbit satelit Indonesia, agar tetap menjadi milik dan kendali Indonesia
- c. Menggelar jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring) untuk menghubungkan 497 kab/kota di Indonesia

2. Efisiensi industri telekomunikasi

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong efisiensi industri telekomunikasi adalah:

- a. Mendorong operator telekomunikasi untuk berkonsolidasi dalam rangka efisiensi industry telekomunikasi
- b. Membangun infrastruktur pasif bersama (*Passive infrastruktur sharing*) dalam rangka meringankan biaya investasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi
- c. *E-Licensing* Spektrum Radio (*Machine to Machine*)

3. Mendorong Peningkatan Jumlah Kandungan Dalam Negeri pada Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong peningkatan jumlah kandungan dalam negeri pada alat dan perangkat telekomunikasi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap industri telekomunikasi. Strateginya adalah dengan memantau dan mengawasi implementasi regulasi tentang TKDN alat dan perangkat telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor alat dan perangkat telekomunikasi yang menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan.

4. Mengintegrasikan Nomor Panggilan

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan nomor panggilan untuk menghadapi keadaan darurat nasional adalah dengan menyediakan nomor panggilan tunggal darurat (*single emergency number*).

5. Penataan Registrasi Prabayar

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mencegah penipuan melalui layanan telekomunikasi adalah dengan menyusun kebijakan/regulasi tentang tata cara registrasi dan aktivasi kartu prabayar serta tata niaga distribusi kartu prabayar.

6. Mengurangi Peredaran Perangkat Telepon Selular Ilegal

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengurangi peredaran perangkat telepon selular ilegal yang berpotensi merugikan negara dalam hal kontribusi pajak, adalah dengan:

- a. Merumuskan strategi/kebijakan penataan registrasi IMEI untuk perangkat
- b. Memastikan kepatuhan dan penegakan hukum pelanggar registrasi IMEI

7. Meningkatkan Keamanan Informasi dan Optimalisasi Tata Kelola Internet

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan keamanan informasi dan optimalisasi tata kelola internet, adalah dengan:

- a. Menyiapkan rujukan standardisasi *security* untuk sektor strategis
- b. Menerapkan Sertifikasi sistem elektronik strategis
- c. Pembentukan Panel untuk penanganan situs bermuatan negatif
- d. Pemberian tanda daftar sistem penyelenggaraan elektronik
- e. Penyusunan dan pengesahan Permen Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Permen Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK)

8. Mendorong Pertumbuhan *e-Commerce*

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong pertumbuhan *e-commerce* nasional, adalah dengan:

- a. Merumuskan *Roadmap e-Commerce* Nasional untuk 5 – 10 tahun ke depan
- b. Melakukan pengumpulan data proliferasi *e-commerce*.
- c. Mendorong pengembangan dan peningkatan jumlah *start up company*

9. Menerapkan DNS dalam Rangka Mengurangi Konten Ilegal

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan DNS dalam rangka mengurangi konten ilegal, berbahaya, dan malware, adalah dengan:

- a. Menetapkan Permen tentang DNS Nasional (Tersedianya DNS Nasional).
- b. Diharapkan 4 penyelenggara jaringan telekomunikasi sudah menerapkan DNS Nasional pada Q4 2015.
- c. Implementasi DNS Nasional secara menyeluruh.

10. Mengintegrasikan Layanan e-Government

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan layanan e-government nasional, adalah dengan:

- a. Menyusun masterplan dan memastikan penetapan perpres e-government sebagai dasar penerapan layanan e-government.
- b. Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4
- c. Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah

11. Mempercepat Proses Migrasi TV Analog ke Digital

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempercepat proses migrasi TV analog ke digital (digitalisasi), adalah dengan:

- a. Menyusun kebijakan/regulasi percepatan migrasi TV analog ke digital.
- b. Memastikan migrasi TV analog ke digital selesai sesuai jadwal *switch off* (2018).
- c. Mendorong percepatan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR.

C1. Program Legislasi Nasional

1. Memastikan Terepelebaikannya Revisi UU ITE

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, adalah dengan:

- a. Konsolidasi naskah akademik tentang UU ITE dengan seluruh stakeholder
- b. Menyampaikan naskah akademik dan RUU perubahan kepada DPR melalui Presiden

2. Penyusunan Revisi UU Penyiaran Bersama DPR

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah dengan:

- a. Menyusun naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR
- b. Menyusun rancangan perundang-undangan sebagai pelaksana turunan undang-undang.

3. Penyusunan RUU RTRI Bersama DPR

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), adalah dengan menyusun naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR.

4. Memastikan Terepelebaikannya RUU Bidang Komunikasi dan Informatika

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun beberapa RUU bidang komunikasi dan informatika, adalah dengan menyusun naskah akademik sebagai bahan pembahasan dengan DPR terkait :

- a. Perlindungan data pribadi
- b. Migrasi Televisi Terrestrial dari Analog ke Digital
- c. Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi)
- d. Pos

C2. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

1. Merubah paradigma birokrasi dari perizinan menjadi pelayanan, dengan melakukan program *change management*

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam merubah paradigma pelayanan dengan melakukan program *change management*, adalah dengan:

- a. Launching budaya organisasi reformasi birokrasi dan pelayanan kemkominfo
- b. Menetapkan Permen tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mendorong ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berorientasi pelayanan
- c. Menerapkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di Kementerian Komunikasi dan Informatika
- d. Menyusun sistem dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran
- e. Mempercepat proses perizinan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- f. Memastikan indeks PeGI Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan target rata-rata nasional

2. Melakukan Kajian Terkait Kesiapan Masyarakat dalam Penerapan Pitalebar

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan kajian terkait kesiapan masyarakat untuk penerapan pitalebar, adalah dengan:

- a. Menyusun desain riset, studi literatur, dan pemetaan terhadap *stakeholder*
- b. Analisa dan penyusunan rekomendasi hasil riset terkait kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi pitalebar

3. Menerapkan metode *Risk Based Internal Audit Program*

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan metode Risk Based Internal Audit Program, adalah dengan:

- a. Pengawasan terhadap proses pengadaan
- b. Review atau evaluasi atas pengelolaan PNPB dan anggaran
- c. Audit kinerja atas program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika

- d. Audit atas pengelolaan BMN (termasuk hibah)
- e. Pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan
- f. Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal



3.3 Kerangka Regulasi

Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama DPR akan menyusun beberapa regulasi sebagai berikut:

NO.	JUDUL RUU	RENCANA PEMBAHASAN					KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	RUU tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	✓					Inisiatif Pemerintah
2	RUU tentang Radio Televisi Indonesia	✓					Inisiatif DPR
3	RUU tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	✓					Inisiatif DPR
4	Rancangan UU tentang Perlindungan Data Pribadi		✓				Inisiatif Pemerintah

NO.	JUDUL RUU	RENCANA PEMBAHASAN					KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019	
5	RUU Migrasi Televisi Terestrial dari analog ke Digital		✓				Inisiatif Pemerintah
6	RUU tentang Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi)			✓			Inisiatif Pemerintah
7	Rancangan UU tentang Perubahan UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos				✓		Inisiatif Pemerintah

Selain matriks diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyusun:

- Regulasi penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel, Kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika
- RPP PDES, Peraturan perundang-undangan di bidang e-Business, Regulasi/kebijakan di bidang e-Government, Peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemberdayaan industri TIK, Peraturan perundangan di bidang Pemberdayaan Informatika, Kebijakan/ regulasi Keamanan Informasi
- Rancangan regulasi SKKNI bidang kominfo
- Regulasi dasar untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik, Kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik, Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA, Kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi, Perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi internasional.



3.4 Kerangka Kelembagaan

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan dilakukan dengan memperhatikan:

1. Perubahan pola rezim perijinan ke rezim pelayanan
2. Arah dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang fokus kepada sektor telekomunikasi, tata kelola internet dan digitalisasi siaran televisi
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan komunikasi dan informatika
4. Tata laksana dan sumber daya Aparatur Sipil Negara.

2. Penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan poin di atas, maka akan dilakukan penataan pada organisasi pusat, dan unit pelaksana teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah, serta penguatan SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah penguatan kelembagaan antara lain:

1. Dalam rangka percepatan implementasi teknologi pitalebar (*pitalebar*) dan pengembangan ekosistemnya perlu dibentuk organisasi unit eselon II yang khusus menangani pitalebar.
2. Badan Layanan Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika sebagai eksekutor dari penyediaan infrastruktur TIK di daerah non komersial (USO) yang selama ini merupakan Unit Kerja Eselon III, perlu ditingkatkan kapasitasnya mengingat tanggung jawab dan luasnya lingkup pekerjaan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



4.1 Target Kinerja

Pada tahun 2015—2019 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitikberatkan kepada 4 (empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Sasaran Strategis/ IKS	2015	2016	2017	2018	2019	
SS.1.	<i>Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan</i>					
IKS.1	Jumlah pembangunan sarana/ Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia	20 Tugu Berkode Pos	50 tugu berkode pos	Monev tugu berkod e pos	Monev tugu berkod e pos	Monev tugu berkod e pos
IKS.2	Persentase (%) penyelesaian Redesain USO	100% (Penyelesaian Regulasi terkait Redesain USO)	Monev Redesain USO	Monev Redesain USO	Monev Redesain USO	Monev Redesain USO
IKS.3	Jumlah BTS yang dibangun di daerah <i>blankspot</i> layanan telekomunikasi (Tertinggal, Terluar & Terpencil)	125 BTS	125 BTS	125 BTS	125 BTS	125 BTS

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.4	Jumlah penyediaan akses <i>pitalebar</i> internet	800 Lokasi (Sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)
IKS.5	Persentase (%) tersedianya satelit <i>pitalebar</i> Nasional	100% (Kajian Feasibility Study)	100% (tender penyedia satelit)	40% Penyediaan Satelit dan sarana dan infrastruktur	60% Penyediaan Satelit dan sarana dan infrastruktur	100%
SS.2	<i>Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</i>					
IKS.1	Persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak <i>pitalebar</i>	20 MHz	70 MHz	70 MHz	90 MHz	100 MHz

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.2	Persentase (%) kab/kota yang terhubung Jaringan tulang punggung serat optik nasional palapa ring	Persiapan regulasi, Dokumen lelang dan pelaksanaan lelang, dan Ground breaking Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring untuk 51 Kab/kota tertinggi)	Penggelaran palapa ring di 26 kab/Kota	Penggelaran palapa ring di 25 kab/kota (100% di 51 Kab/Kota)	Monev Palapa Ring	Monev Palapa Ring
IKS.3	Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital (100% Penyusunan Regulasi TV Digital	menjadi 80% (sulawesi)	menjadi 90% (MALU KU +PAPU A+ Bangka Belitung + Gorontalo)	menjadi 100% (NATION WIDE ANALOG SWITCH OFF)	Monev TV digital
IKS.4	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (<i>single publik emergency number</i>)	Implementasi di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi nasional

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.5	Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo	Pembangunan 3 kota lokasi pengembangan infrastruktur pasif bersama	Pembangunan 5 kota pengembangan infrastruktur pasif bersama	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi
IKS.6	Persentase (%) penetapan dan implementasi Permen kominfo tentang TKDN 4G LTE	100% (ditetapkannya permen kominfo tentang TKDN 4G LTE)	100% (persiapan menjelang implementasi)	100% (implementasi permen)	Monev Permen Kominfo tentang TKDN 4G LTE	Monev Permen Kominfo tentang TKDN 4G LTE
IKS.7	Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan e-government Nasional	100% (masterplan arsitektur e-Government Nasional)	Monev integrasi e-gov	Monev integrasi e-gov	Monev integrasi e-gov	Monev integrasi e-gov
IKS.8	Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS Nasional	4 penyelenggara	Monev implementasi DNS Nasional	Monev implementasi DNS Nasional	Monev implementasi DNS Nasional	Monev implementasi DNS Nasional

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.9	Persentase (%) peningkatan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan komunikasi dan informatika (ID-SIRTII dan KAMINFO)	100%	100%	100%	100%	100%
SS.3	<i>Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman</i>					
IKS.1	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	4 dokumen regulasi / kebijakan	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi
IKS.2	Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan <i>National Chief Information Officer (NCIO)</i>	1 PM	Implementasi, pemantauan dan pelaksanaan permen	Monev Permen terkait NCIO	Monev Permen terkait NCIO	Monev Permen terkait NCIO

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.3	Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	2 PM	Implementasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan permen	Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan
IKS.4	Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik	6 regulasi	Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik
IKS.5	Jumlah regulasi terkait implementasi <i>Government Publik Relations (GPR)</i>	5 regulasi	Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	Monev regulasi terkait GPR	Monev regulasi terkait GPR	Monev regulasi terkait GPR

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.6	Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental	2 kebijakan	Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	Monev kebijakan terkait revolusi mental	Monev kebijakan terkait revolusi mental	Monev kebijakan terkait revolusi mental
SS.4	<i>Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien</i>					
IKS.1	Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi <i>pitalebar</i> , internet, dan Digitalisasi Penyiaran)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)
IKS.2	Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda	7.575 orang	1250 orang	1450 orang	1450 orang	1450 orang
IKS.3	Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo	4 RSKKNI	4 RSKKNI	4 RSKKNI	4 RSKKNI	4 RSKKNI

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.4	Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas	2.500 peserta	4100 peserta	5100 peserta	6100 peserta	7100 peserta
IKS.5	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKS.6	Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkominfo	100% (2 satker utama)	100%	100%	100%	100%
IKS.7	Persentase (%) terselesainya pelaksanaan kebijakan <i>Change Management</i>	100%	100%	100%	100%	100%
IKS.8	Persentase (%) tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, design, execution dan monitoring) anggaran dan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%



4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode tahun 2015-2019 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non BLU), PNBP BLU dan juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Selain sumber pendanaan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk mendanai program kerja utama seperti pembangunan Palapa Ring.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014—2019 dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahun 2014—2019 merupakan pelaksanaan rencana strategis pada masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014—2019. Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal sampai dengan tahun 2014 akan dikompensasi pada pelaksanaan rencana strategis tahun 2015—2019. Karena itu, penyusunan rencana strategis tahun 2015—2019 menjadi suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan rencana strategis menyebabkan sasaran rencana strategis tidak tercapai. Rencana strategis tahun 2015—2019 dilaksanakan dengan mengacu pada capaian strategis tahun 2010—2014 menyelaraskan visi dan misi Jalan Perubahan yang diusung pemerintahan saat ini melalui program prioritas Nawacita serta mengantisipasi kondisi dinamis lingkungan global. Rencana kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terdapat di rencana strategis tahun 2015—2019 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi prognosis agar jelas apakah setiap sasaran strategis sudah ada yang melaksanakannya atau belum.

Target pencapaian Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKj).

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

TTD

RUDIANTARA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2015 - 2019
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI				
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
059			KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,696.4	
059	06		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA															3,198.5			
059	06			Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)																	
059	06				Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	5,7%	30%	50%	70%	100%											
059	06				Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	90%	92%	93%	94%	95%											
059	06				Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	90%	92%	93%	94%	95%											
059	06			Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan																	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	06				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	79	81	82	84	85							
059	06				Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	8.5	8,6	8,7	8.8	8,9							
				Meningkatkan daya saing industri telekomunikasi dalam negeri													
					Persentase (%) penetapan dan implementasi Permenkominfo tentang TKDN 4G LTE	100% (ditetapkan PM Kominfo tentang TKDN 4G LTE)		100% (implementasi 30% subscriber, 40% Base Stasion)									
				Percepatan Pelayanan Perijinan ISR Microwave Link													
					Persentase (%) terselenggaranya layanan M2M untuk Perijinan ISR Microwave Link	100%											
				Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit multifungsi													
					Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU	100%	100%	100%	100%	100%							
				Tersedianya radio nelayan yang standard dan terjangkau													

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
					Persentase (%) tersedianya percontohan perangkat radio nelayan untuk Desa Nelayan di lokasi Prioritas BNPP-KKP mengunakan dana USO	100% (50 Lokasi)											
					Persentase (%) tersedianya prototype Radio Nelayan yang siap diproduksi massal dan layak dipasarkan dengan harga terjangkau dan memenuhi standar maritim	100%											
059	06	3052	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika													447.8	
059	06	3052		Meningkatnya layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos, telekomunikasi												447.8	
059	06	3052			Persentase (%) layanan pengujian perangkat pos dan telekomunikasi	85%	90%	90%	90%	90%							
059	06	3052			Persentase (%) kesesuaian laboratorium pengujian dan kalibrasi dengan persyaratan teknis dan standar ITU	90%	90%	90%	90%	90%							
					Persentase (%) jumlah hasil kalibrasi perangkat pos dan informatika	90%	90%	90%	90%	90%							
					Layanan administrasi dan dukungan teknis	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan							
059	06	3053	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika													917.6	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
060	06	3053		Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan penggunaan spektrum dan perangkat informatika sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui dukungan infrastruktur SIMS dan infrastruktur monitoring yang memadai											917.6		
061	06	3053			Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi	90%	90%	90%	90%	90%							
					Persentase (%) penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.	90%	90%	90%	90%	90%							
					Layanan administrasi dan dukungan teknis												
059	06	3054	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit												127.4		
				Terwujudnya Efisiensi dan Percepatan Perijinan ISR, pencegahan fraud dalam perijinan ISR (Program M2M), peningkatan pendapatan BNPP, yang berart i meningkatkan sumber APBN													
					Jumlah regulasi/ kebijakan tentang percepatan layanan perizinan spektrum frekuensi radio (M2M)	100%	-	-	-	-							
059	06	3054		Terwujudnya pelayanan perizinan frekuensi secara cepat, tepat dan pasti sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat.											65.5		

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	06	3054			Persentase (%) kepuasan pelayanan proses perizinan frekuensi radio	83%	85%	87%	90%	92%							
059	06	3054			Persentase (%) pelayanan perizinan frekuensi radio yang tepat waktu	82%	85%	87%	90%	92%							
059	06	3054		Terwujudnya pelayanan sertifikasi operator radio secara cepat, tepat dan pasti sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat.											42.8		
059	06	3054			Persentase (%) kepuasan pelayanan proses sertifikasi operator radio	83%	85%	87%	90%	92%							
059	06	3054			Persentase (%) pelayanan jumlah operator radio yang bersertifikat tepat waktu	82%	85%	87%	90%	92%							
059	06	3054		Optimalnya pengelolaan dan peningkatan BHP Frekuensi Radio.											19.1		
059	06	3054			Persentase (%) pencapaian target PNB	100%	100%	100%	100%	100%							
059	06	3055	Pengendalian Pemanfaatan Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika												975.4		
				Terwujudnya Efisiensi dan Percepatan Perijinan ISR, pencegahan fraud dalam perijinan ISR (Program M2M), peningkatan pendapatan PNB											975.4		
059	06	3055			Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur dan aplikasi layanan on line SIMS	100% (tersedianya layanan M2M dalam SIMS)	100% (tersedianya layanan M2M dalam SIMS)	100% (tersedianya layanan M2M dalam SIMS)	100% (tersedianya layanan M2M dalam SIMS)	100% (tersedianya layanan M2M dalam SIMS)							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	06	3055		Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan penggunaan spektrum dan perangkat informatika sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui dukungan infrastruktur SIMS dan infrastruktur monitoring yang memadai.											0.0		
059	06	3055			Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	91%	92%	93%	94%	95%							
059	06	3055			Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	91%	92%	93%	94%	95%							
059	06	3055			Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	80% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi)	80% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi)	81% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi)	83% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi)	85% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi)							
059	06	3056	Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit												122.1		
059	06	3056		Tertatanya spektrum frekuensi sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan internasional dengan memperhatikan efisiensi spektrum.											62.2		
059	06	3056			Persentase (%) tersedianya regulasi tentang penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel (1 PP terkait Spektrum Flexibility).	20%	30%	50%	70%	100%							
059	06	3056			Persentase (%) ketersediaan spektrum untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial	30%	50%	70%	100%	100%							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	06	3056			Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka migrasi teknologi radio komunikasi Dinas Maritim dari analog ke digital	20%	30%	50%	70%	100%							
059	06	3056			Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung tanggap darurat kebencanaan atau PPDR (Public Protection Disaster Relief)	20%	30%	50%	70%	100%							
059	06	3056		Tersedianya slot orbit dan pita frekuensi untuk keperluan satelit multifungsi.											35.4		
059	06	3056			Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit indonesia yang sudah ternetifikasi di ITU	100%	100%	100%	100%	100%							
059	06	3056			Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio	35	40	45	50	55							
059	06	3056		Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)											24.5		
059	06	3056			Persentase (%) penambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband.	5,7% (2 x 10 MHz)	30%	50%	70%	100%							
059	06	3057	<u>Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika</u>												156.9		

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	06	3057		Tersedianya standar alat dan perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi nasional di bidang wireless broadband yang berorientasi lingkungan (Green ICT)											156.9		
059	06	3057			Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika	10 draft, 1 regulasi tentang Penataan Registrasi IME untuk Perangkat Seluler	10 draft	10 draft	10 draft	10 draft							
059	06	3057			Persentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan	70%	72%	75%	78%	80%							
059	06	3057			Jumlah pra-proto type dan prototype produk dalam negeri bidang informatika	4 Prototype - Tersedianya prototype radio keselamatan nelayan yang disesuaikan dengan kebutuhan nelayan - Tersedianya radio keselamatan nelayan di 50 lokasi prioritas BNPP dan KKP - Tersedianya perangkat radio keselamatan nelayan berfitur radio cuaca	4 Prototype	5 Judul Penelitian	4 Prototype	4 Prototype							
059	06	3058	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika												451.2		
059	06	3058		Terselenggaranya dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI											451.2		
059	06	3058			Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	06	3058			Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian	33 dok	33 dok	33 dok	33 dok	33 dok							
059	06	3058			Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok							
059	06	3058			Jumlah laporan pelaksanaan keuangan	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok							
					Jumlah Bulan Layanan administrasi dan dukungan teknis lainnya												
059	07		PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA													18,993.7	
059	07			Tersedianya tanda batas wilayah kedaulatan RI di daerah perbatasan dan pulau terdepan													
059	07			Jumlah Pembangunan Sarana / Tugu Berkode Pos di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan di Indonesia	20 Tugu berkode pos	50 Tugu Berkode pos (Target 2019 dipercepat ke 2016)											
059	07			Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata													
059	07			Jumlah KPCLPU yang beroperasi	2330	2335	2340	2345	2350								
059	07			Terwujudnya industri telekomunikasi Indonesia yang kuat dan mampu bersaing dengan industri digital global, efisiensi industri, peningkatan kualitas layanan, keterjangkauan harga layanan broadband, mencegah spam dan fraud layanan telekomunikasi dan melindungi publik dari penggunaan perangkat yang tidak sesuai ketentuan, serta mencegah kerugian keuangan negara													

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI		
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
059	07				Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	4 Dokumen Regulasi/kebijakan : 1. Regulasi Konsolidasi dan restrukturisasi industri telekomunikasi terkait : a. Infrastruktur sharing b. Right of Way c. Infrastruktur Pasif d. Open Akses e. Partnership (Kemitraan Layanan) f. Merger Akuisisi konsolidasi Spin off g. Perbaikan tata niaga jaringan dan jasa telekomunikasi; 2. Kebijakan roadmap industri digital; 3. Regulasi terkait kartu perdana dan starter kit; 4. Regulasi terkait Registrasi IMEI.													
059	07			Terselesaikannya pembangunan Jaringan tulang punggung serat optik nasional (palapa ring)															
059	07				Jumlah kab/kota yang terhubung Jaringan tulang punggung serat optik nasional (palapa ring)	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan regulasi Dokumen lelang dan pelaksanaan lelang Ground breaking Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring untuk 51 Kab/kota tertinggal	20% kabupaten/kota yang belum tersedia backbone	100% kabupaten/kota yang belum tersedia backbone	penyediaan backhaul 20% dari kabupaten/kota yang tersedia backbone	penyediaan backhaul 100% dari kabupaten/kota yang tersedia backbone									
059	07			Terciptanya efisiensi infrastruktur, terdistribusinya pendapatan sektor telekomunikasi ke daerah-daerah, dan mendukung pengembangan smart cities															

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07				Jumlah Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemkominfo	<ul style="list-style-type: none"> • Terpilihnya 3 Kab/Kota dari 8 kota/kab hasil survey pengembangan infrastruktur pasif • Detail engineering design infrastruktur pasif di 3 kota/kab yang terpilih • Ground breaking pembangunan infrastruktur pasif di 3 kota terpilih 	Pembangunan infrastruktur pasif di 2 kota terpilih	Pembangunan infrastruktur pasif di 1 kota terpilih	Pembangunan infrastruktur pasif di 1 kota terpilih	Pembangunan infrastruktur pasif di 1 kota terpilih							
059	07			Tersedianya infrastruktur dan akses layanan akses informasi di wilayah non komersial													
					Persentase (%) penyelesaian dan implementasi redesain USO	100% : 1. Ditetapkan Permen Redesain USO, 2. Terbangunnya 50 sistem desa broadband terpadu;	Implementasi Permen Redesain USO	Implementasi Permen Redesain USO	Implementasi Permen Redesain USO	Implementasi Permen Redesain USO							
059	07				Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi (tertinggal, tertular & terpencil)	125 BTS	125 BTS	125 BTS	125 BTS	75 BTS							
059	07				Jumlah penyediaan akses broadband internet	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)							
059	07				Penyediaan pendukung (ekosistem infrastruktur meliputi: - pengembangan SDM dan Literasi, - Inkubator Konten Lokal - Revitalisasi NIX - DNS Nasional - Payment Gateway Nasional	1. Pengembangan SDM dan Literasi: 5 Lokasi 2. Inkubator Konten Lokal :1 Lokasi 3. Revitalisasi NIX	1. Pengembangan SDM dan Literasi: 10 Lokasi 2. Inkubator Konten Lokal :1 Lokasi	1. Pengembangan SDM dan Literasi: 15 Lokasi 2. Inkubator Konten Lokal :1 Lokasi	1. Pengembangan SDM dan Literasi: 20 Lokasi 2. Inkubator Konten Lokal :1 Lokasi 3. revitalisasi 50 % NIX	1. Pengembangan SDM dan Literasi: 25 Lokasi 2. Inkubator Konten Lokal :1 Lokasi 3. revitalisasi 100 % NIX yang telah dibangun							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07			Peningkatan Jangkauan siaran melalui Revitalisasi infrastruktur dan meningkatkan kualitas siaran Penyiaran Publik serta migrasi sistem penyiaran televisi analog ke digital													
059	07				Jumlah lokasi pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi	24 lokasi											
059	07				Jumlah lokasi fasilitas (Pemancar, genset, dll) LPP RRI yang direhabilitasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar	11 lokasi (1 lokasi pemancar digital, 10 lokasi pemancar analog)											
059	07				Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital	Penyusunan Regulasi TV Digital	menjadi 80% (sulawesi)	menjadi 90% (MALUKU +PAPUA+ Bangka Belitung+ Gorontalo)	menjadi 100% (NATION WIDE ANALOG SWITCH OFF)								
059	07				Tersedianya rancangan RUU Penyiaran yang mengatur terciptanya industri penyiaran yang sehat, tersedianya keberagaman konten yang sesuai dengan karakter bangsa, kepemilikan dan digitalisasi penyiaran												
059	07				Jumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dibahas	Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002											
059	07				Tersedianya rancangan RUU Radio dan Televisi RI												
059	07				Jumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Radio Televisi RI yang dibahas	Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU RTRI											

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07			Tersedianya Nomor panggilan tunggal darurat nasional (single public emergency number)													
059	07			Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (single public emergency number)	Implementasi di 10 (satu) Kabupaten/Kota percontohan	4% (Pembangunan jaringan dengan Pemprov DKI)	12% (Pembangunan jaringan dengan 4 Pemprov Se-Jawa)	40% (Pembangunan jaringan dengan 10 Pemprov se Sumatera)	40% (Pembangunan jaringan dengan 10 Pemprov se Sulawesi)								
059	07			Tersedianya regulasi di bidang penyelenggaraan Pos dan informatika													
059	07			RUU Telekomunikasi	100% 1. Penyusunan Naskah Akademik RUU Konvergensi 2. Penyusunan Draft Awal RUU Konvergensi	100% 1. Pembahasan Antar Kementerian 2. Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM 3. Usulan Pendaftaran dalam Prolegnas Prioritas	100% Pembahasan RUU dengan DPR RI										
059	07			RUU Pos	100% 1. Penyusunan Naskah Akademis Revisi UU Pos 2. Penyusunan Draft awal Revisi UU Pos	100% Pembahasan antar kementerian draft Revisi UU Pos	100% Harmonisasi Draft Revisi UU Pos	100% 1. Pembahasan Draft Revisi UU Pos dengan DPR									
059	07			RUU revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran	100% 1. Penyusunan Naskah Akademik 2. Penyusunan Draft RUU (versi pemerintah) dan pelaksanaan Rapat dengan DPR-RI	100% 1. Pembahasan RUU di tingkat harmonisasi											
059	07	3059	Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet													121.6	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07	3059		Tersedianya perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan											121.6		
059	07	3059			Jumlah top insiden pemantauan, deteksi dan peringatan dini insiden setiap hari	30 top insiden	40 top insiden	50 top insiden	75 top insiden	100 top insiden							
059	07	3059			Jumlah hari respon terhadap pengaduan insiden	max 2 hari	max 2 hari	max 2 hari	max 2 hari	1 hari							
059	07	3059			Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya telah ditempatkan perangkat deteksi dengan availabilitas 99% dan terhubung dengan sistem pemantauan	50	55	60	65	70							
059	07	3060	<u>Penyediaan Infrastruktur & Layanan Telekomunikasi & Penyiaran</u>												15,577.7		
059	07	3060		Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial											3,482.0		
059	07	3060			Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi	Pilot Project 50 BTS	75 BTS	100 BTS	150 BTS	200 BTS							
					Jumlah penyediaan akses broadband internet	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pedalaman)							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07	3060			Jumlah insfrastruktur penyiaran didaerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar (hibah)	10 Lokasi	15	20	25	30							
					Jumlah penyediaan perangkat pendukung (hibah)												
059	07	3060		Tersedianya dukungan TIK untuk mempercepat pengembangan ekosistem dan adopsi TIK di masyarakat											3,124.0		
059	07	3060			Jumlah rusunawa yang terlayani internet	10 Rusunawa	10 Rusunawa	10 Rusunawa	10 Rusunawa	10 Rusunawa							
059	07	3060			Jumlah lokasi desa nelayan dan pertanian yang terlayani akses internet	20 lokasi	20 lokasi	30 lokasi	30 lokasi	30 lokasi							
		3060		Terciptanya efisiensi infrastruktur nasional, Terdistribusinya pendapatan sektor telekomunikasi ke daerah-daerah dan Mendukung pengembangan Smart Cities													
059	07	3060			Jumlah Ducting & Tower Bersama	survey 8 kota dan pilot project 3 kota (- Penetapan 8 kota, lokasi pengembangan infrastruktur pasif - Tersedianya detail engineering design infrastruktur pasif - Groundbreaking pilot project pembangunan infrastruktur pasif di 3 kota)	2 kota	1 kota	1 kota	1 kota							
					Penyediaan Infrastruktur NIX	% Evaluasi NIX Eksisting	2 NIX	2 NIX	2 NIX	2 NIX							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07	3060			Penyediaan pendukung (ekosistem infrastruktur meliputi: - pengembangan SDM dan Literasi, -Inkubator Konten Lokal - Revitalisasi NIX - DNS Nasional - Payment Gateway Nasional	1. Pengembangan SDM dan Literasi: 5 Lokasi 2. Inkubator Konten Lokal :1 Lokasi 3. Revitalisasi NIX	1.Pengembang an SDM dan Literasi: 10 Lokasi 2. Inkubator Konten Lokal :1 Lokasi	1.Pengembang an SDM dan Literasi: 15 Lokasi 2. Inkubator Konten Lokal :1 Lokasi	1.Pengembang an SDM dan Literasi: 20 Lokasi 2. Inkubator Konten Lokal :1 Lokasi 3. revitalisasi 50 % NIX	1.Pengembang an SDM dan Literasi: 25 Lokasi 2. Inkubator Konten Lokal :1 Lokasi 3. revitalisasi 100 % NIX yang telah dibangun							
					Terpenuhinya Layanan administrasi dan dukungan teknis lainnya												
059	07	3060		Tersedianya jaringan internet super cepat												2,090.0	
059	07	3060			Persentase (%) terselesaikannya pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional	100% persiapan lelang dan bisnis model, feasibility study, proses lelang dan groundbreaking	20% kabupaten/kota yang belum tersedia backbone	100% kabupaten/kota yang belum tersedia backbone	penyediaan backhaul 20% dari kabupaten/kota yang tersedia backbone	penyediaan backhaul 100% dari kabupaten/kota yang tersedia backbone							
059	07	3060		Terselesaikannya kontrak jasa penyediaan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika yang menjadi kewajiban BP3TI												2,881.7	
059	07	3060			Persentase (%) penyelesaian kewajiban kontrak layanan jasa akses internet	40%	60%	80%	100%	-							
059	07	3060		Tersedianya satelit multifungsi												4,000.0	
					Persentase (%) penyediaan satelit multi fungsi				40% Penyediaan Satelit dan sarana dan prasarana	60% Penyediaan Satelit dan sarana dan prasarana							
059	07	3061	<u>Pengembangan Infrastruktur & Layanan Telekomunikasi & Penyiaran</u>													1,809.4	
059	07	3061		Terwujudnya kebijakan/regulasi di bidang telekomunikasi khusus												54.6	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07	3061			Persentase (%) penyusunan materi kebijakan/regulasi bidang telekomunikasi khusus	100% (Permen tentang redesain USO)	100%	100%	100%	100%							
059	07	3061		Tersedianya Infrastruktur untuk menangani kebencanaan & layanan panggilan tunggal untuk gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call) serta konektivitas infrastruktur TIK antar K/L dan Pemprov											294.0		
059	07	3061			Persentase (%) integrasi sistem informasi kebencanaan dengan stakeholder (BNPB, BMKG, PU, Vulkanologi)	100% penyelesaian persiapan integrasi sistem informasi kebencanaan	25% (integrasi jaringan dengan BNPB)	25% (integrasi jaringan dengan BMKG)	25% (integrasi jaringan PU)	25% (integrasi jaringan Vulkanologi)							
059	07	3061			Persentase (%) penyediaan layanan panggilan tunggal untuk gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call)	100% (- sosialisasi konsep pelaksanaan nomor panggilan tunggal darurat nasional - terlaksananya uji coba di 10 Kab/kota sebagai titik percontohan)	4% (Pembangunan jaringan dengan Pemprov DKI)	12% (Pembangunan jaringan dengan 4 Pemprov Se-Jawa)	40% (Pembangunan jaringan dengan 10 Pemprov se Sumatera)	40% (Pembangunan jaringan dengan 10 Pemprov se Sulawesi)							
059	07	3061			Persentase (%) penyediaan Government Network (GN)	100% penyelesaian Dokumen Kajian tentang Penerapan GN di Indonesia	100% penyelesaian regulasi backbone GN dalam rangka e-Government dan Survey Lapangan	10% Implementasi penyediaan backbone GN di K/L berdasar kebijakan/regulasi GN	5% Implementasi penyediaan backbone GN di Pemerintah Provinsi berdasar kebijakan/regulasi GN	menjadi 10% Implementasi penyediaan backbone GN di Pemerintah Provinsi berdasar kebijakan/regulasi GN							
059	07	3061			Persentase (%) penyediaan Public Protection and Disaster Relief (PPDR)	100% penyelesaian Dokumen Kajian tentang Penerapan PPDR di Indonesia	100% penyelesaian regulasi PPDR dan survey lapangan	20% pilot project PPDR di Jawa Tengah	20% pilot project PPDR di Banten	20% pilot project PPDR di Jawa Barat							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
					Persentase (%) persiapan penyediaan satelit Pemerintah	100% penyelesaian Dokumen Kajian tentang Penyediaan Satelit Pemerintah di Indonesia	100% penyelesaian regulasi satelit pemerintah	100% penyelesaian persiapan satelit pemerintah (SDM, kelembagaan, tender satelit dan sarana dan prasarana)									
059	07	3061		Peningkatan jangkauan siaran melalui revitalisasi infrastruktur dan meningkatkan kualitas siaran penyiaran publik serta migrasi sistem penyiaran televisi analog ke digital										1,411.7			
059	07	3061			Jumlah lokasi pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi	24 lokasi (ITTS Phase 2)	36 Lokasi (ITTS Phase 2)	30 Lokasi Monitoring	30 Lokasi Monitoring								
059	07	3061			Jumlah lokasi pembangunan/perbaikan shelter, tower serta sarana & prasarana pendukung LPP TVRI di di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil	24 Lokasi	36 Lokasi	2 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi							
059	07	3061			Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital	Sosialisasi dan kampanye kebijakan dan teknologi TV Digital, Regulasi TV DVB-2 ready)	menjadi 80% (sulawesi)	menjadi 90% (MALUKU +PAPUA+ Bangka Belitung+ Gorontalo)	menjadi 100% (NATION WIDE ANALOG SWITCH OFF)								
059	07	3061			Jumlah lokasi fasilitas (pemancar, genset, dll) LPP RRI yang direhabilitasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar	survey lokasi + 1 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi							
059	07	3061		Terwujudnya layanan bidang telekomunikasi khusus dan layanan khusus penyiaran										49.1			
059	07	3061			Persentase (%) penanganan proses perizinan bidang telekomunikasi khusus dan layanan khusus penyiaran	100%	100%	100%	100%	100%							



KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07	3062	Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika												155.7		
059	07	3062		Terkendalinya penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku											155.7		
059	07	3062			Persentase (%) pencapaian target PNBP dari BHP Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%							
059	07	3062			Persentase (%) kepatuhan :												
059	07	3062			a. Penyelenggara Pos	70%	75%	80%	85%	90%							
059	07	3062			b. Penyelenggara Jaringan telekomunikasi	70%	75%	80%	85%	90%							
059	07	3062			c. Penyelenggara Jasa telekomunikasi	70%	75%	80%	85%	90%							
059	07	3062			d. LPS dan LPB	70%	75%	80%	85%	90%							
059	07	3062			Persentase (%) verifikasi TKDN dalam penyelenggaraan telekomunikasi sesuai amanat regulasi	100%	100%	100%	100%	100%							
059	07	3062			Persentase (%) capaian QoS penyelenggara selular	70%	75%	80%	85%	90%							
059	07	3063	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos												172.7		
059	07	3063		Tersedianya tools regulator guna mendorong industri pos yang berdaya saing dan ramah lingkungan											65.3		
059	07	3063			Persentase (%) revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos	100%	100%	100%	100%	100%							
059	07	3063			Persentase (%) penyusunan materi regulasi pendukung bidang Pos	60%	70%	70%	70%	70%							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07	3063		Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata dan terjangkau baik komersial maupun universal											77.7		
059	07	3063			Jumlah Tugu Pos yang dibangun di daerah perbatasan, pulau terluar	10	12	14	16	18							
059	07	3063			Jumlah KPCLPU yang beroperasi	2330	2335	2340	2345	2350							
059	07	3063			Jumlah tema dan penerbitan Prangko	15	15	15	15	15							
059	07	3063			Persentase (%) pemanfaatan dan pembinaan Filateli ditingkat :												
059	07	3063			a. Propinsi	100%	100%	100%	100%	100%							
059	07	3063			b. Kota/Kab	100%	100%	100%	100%	100%							
059	07	3063			Persentase (%) verifikasi pemantauan terhadap layanan pos, pelaksanaan PSO, tarif LPK dan LPU	100%	100%	100%	100%	100%							
				Peningkatan pelayanan perijinan penyelenggaraan Pos											29.7		
059	07	3063			Persentase (%) penanganan permohonan layanan perizinan bidang pos	100%	100%	100%	100%	100%							
059	07	3064	<u>Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi</u>												178.1		
059	07	3064		Terciptanya efisiensi industri telekomunikasi dalam rangka pengembangan industri digital dan mewujudkan industri telekomunikasi yang berdaya saing dan ramah lingkungan											124.1		

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07	3064			Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan bidang Telekomunikasi	100% (- Tersedianya Regulasi Konsolidasi dan restrukturisasi industri telco - Tersusunnya Naskah akademis pengembangan industri digital - tersedianya Roadmap industri digital - Kebijakan/ regulasi tata cara registrasi dan aktivasi serta tata niaga distribusi kartu perdana pra bayar) - Regulasi penataan IMEI untuk perangkat)	100%	100%	100%	100%							
059	07	3064		Peningkatan pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi												54.0	
059	07	3064			Persentase (%) penanganan perizinan bidang telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%							
<u>059</u>	<u>07</u>	<u>3065</u>	<u>Pembinaan dan pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran</u>													<u>147.1</u>	
059	07	3065		Meningkatnya jangkauan siaran LPB jasa penyiaran Televisi dan LPS Jasa Penyiaran Radio dan Televisi												21.0	
059	07	3065			Persentase (%) pembukaan peluang usaha bagi LPB dan LPS untuk melakukan ekspansi jaringan siaran untuk menutup blank spot	100%	100%	100%	100%	100%							
059	07	3065		Meningkatnya pelayanan perizinan penyelenggaraan penyiaran												107.2	
059	07	3065			Persentase (%) penanganan permohonan perizinan penyiaran radio dan televisi	Radio : 60% Televisi : 60%	Radio : 65% Televisi : 65%	Radio : 70% Televisi : 70%	Radio : 75% Televisi : 75%	Radio : 80% Televisi : 80%							
059	07	3065		Terwujudnya industri penyiaran yang berdaya saing dan ramah lingkungan												18.9	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07	3065			Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan di bidang Penyiaran	50% (antara lain: Kebijakan dan Regulasi Percepatan Digital Switchover memanfaatkan potensi BHP Frekuensi dan/atau dana USO)	60%	75%	90%	100%							
059	07	3066	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika												831.4		
059	07	3066		Terwujudnya Layanan Administrasi dan dukungan Teknis Lainnya											831.4		
059	07	3066			Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data	8 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen							
059	07	3066			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan anggaran	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan							
059	07	3066			Persentase (%) penanganan permasalahan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%							
059	07	3066			Jumlah laporan pelaksanaan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
059	07	3066			Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan kerjasama serta bantuan hukum	100% 1. Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya dokumen naskah Mou 3. Advokasi dan penanganan masalah hukum di lingkungan Ditjen PPI	100% 1. Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya dokumen naskah Mou 3. Advokasi dan penanganan masalah hukum di lingkungan Ditjen PPI	100% 1. Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya dokumen naskah Mou 3. Advokasi dan penanganan masalah hukum di lingkungan Ditjen PPI	100% 1. Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya dokumen naskah Mou 3. Advokasi dan penanganan masalah hukum di lingkungan Ditjen PPI	100% 1. Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya dokumen naskah Mou 3. Advokasi dan penanganan masalah hukum di lingkungan Ditjen PPI							
059	07	3066			Dukungan layanan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%							
059	07	3066			Jumlah Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%							



KOMINFO

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	08		PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA												661.6		
059	08			Tersedianya layanan eGovernment terintegrasi untuk 10% kabupaten dan kota													
059	08				Persentase (%) penyelesaian dokumen masterplan e- Government Nasional	100%											
059	08				Nilai Index e- Government untuk 10% kabupaten dan kota	2,8	2.9	3	3.2	3.4							
059	08				Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan National Chief Information Officer (NCIO)	1PM											
059	08				Terselenggaranya pelayanan publik yang aman handal terpercaya dan bertanggung jawab serta transparan dan akuntabel												
059	08				Persentase (%) peningkatan pengguna domain Indonesia dari tahun sebelumnya (t-1)	10%	10%	10%	10%	10%							
059	08				Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS nasional	4 Penyelenggara	Seluruh Penyelenggara	Seluruh Penyelenggara	Seluruh Penyelenggara	Seluruh Penyelenggara							
059	08				Terselenggaranya pengamanan sistem elektronik untuk layanan publik												
059	08				Jumlah Peraturan Menteri terkait keamanan informasi (sistem manajemen pengamanan informasi dan administrasi penyidikan dan penindakan)	2 Peraturan Menteri											

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	08				Jumlah Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Publik yang mengikuti Peningkatan Indeks Keamanan Informasi	60 instansi	60 instansi	60 instansi	60 instansi	60 instansi							
059	08			Terselenggaranya ekosistem e-Commerce													
059	08				Jumlah laporan proliferasi e-Commerce nasional	1 Laporan											
059	08				Jumlah Peraturan Menteri (penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan)	2PM											
059	08				Meningkatnya digital ekonomi nasional untuk menciptakan lapangan kerja dan daya saing bangsa	Penyusunan RPM											
059	08				Ekosistem industri yang digital yang kompetitif	5-10 Years Roadmap e-Commerce yang diuji publik											
059	08			Tersedianya peraturan perundangan bidang aplikasi informatika													
059	08				Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Rancangan UU tentang perubahan UU ITE	100%											
059	08			Terpilainya pusat industri berbasis TIK di Jawa-Bali, Sumatra, Sulawesi													
059	08				Jumlah Pusat Industri Berbasis TIK di Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi	Dokumen Kriteria Pemilihan 5 Pusat Industri berbasis TIK											
059	08			Tersedianya arsitektur E-Gov nasional													



KOMINFO

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	08				Persentase (%) penyelesaian dokumen masterplan, blueprint, dan arsitektur e-Government Nasional	100% (MP)	100% (Arsitektur)	100% (Blueprint)	50% (standarisasi)	100% (standarisasi)							
059	08			Terselenggaranya Sistem Elektronik secara aman, andal dan bertanggung jawab													
059	08				Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang beroperasi	2	2	2	2	2							
059	08			Menciptakan agen perubahan dalam pemanfaatan TIK menuju internet cerdas, kreatif, dan produktif (INCAKAP) untuk penguatan karakter dan budaya bangsa													
059	08				Jumlah agen perubahan Internet Cerdas Kreatif Produktif	1,500	10,000	20,000	30,000	40,000							
				Memproteksi kedaulatan negara dan kepentingan sosial & ekonomi nasional dalam era Cyber													
					Jumlah regulasi <i>Cyber Security</i>	<i>Masterplan National Cyber Security</i>											
				Implementasi penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk Nasional (Root CA)													
					Kebijakan pengoperasian penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk Nasional (Root CA)												
					Pengadaan Sistem Sertifikasi Elektronik Induk Nasional (Root CA)												
					Ujicoba Sistem Sertifikasi Elektronik Induk Nasional (Root CA)												

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	08	3029	Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis												60.6		
059	08	3029		Terselenggaranya pelayanan publik yang aman, andal, terpercaya dan bertanggung jawab serta transparan dan akuntabel											21.8		
059	08	3029			Jumlah produk peraturan perundang-undangan di bidang e-Business	2	2	2	2	2							
059	08	3029			Persentase (%) penerbitan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, penyelenggara sertifikasi keandalan, dan penyelenggara agen elektronik terhadap pendaftaran yang masuk	90%	90%	90%	90%	90%							
059	08	3029			Persentase (%) penanganan situs internet bermuatan negatif	70%	70%	80%	80%	80%							
059	08	3029			Persentase (%) peningkatan pengguna domain indonesia dari tahun sebelumnya (t-1)	20%	20%	20%	20%	20%							
059	08	3029		Meningkatnya digital ekonomi nasional untuk menciptakan lapangan kerja dan daya saing bangsa dan Mewujudkan ekosistem industri digital yang kompetitif											38.8		

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	08	3029			Persentase (%) ketersediaan data proliferasi dan pemanfaatan teknologi e-business di Indonesia setiap tahun	100% (Data Proliferasi)	100%	100%	100%	100%							
059	08	3029			Jumlah rekomendasi di bidang industri dan ekonomi digital (emerging digital)	3 (Roadmap e-commerce nasional untuk jangka waktu 5-10 Tahun)	3	3	3	3							
059	08	3029			Jumlah komunitas UMKM yang ditransformasi menjadi e-UMKM	8	8	8	8	8							
059	08	3029			Jumlah Puskomkreatif baru dan penguatan Puskomkreatif yang ada	1 (Terselenggaranya Uji kemampuan dan kompetisi Start-up)	1	1	1	1							
059	08	3030	Pembinaan dan Pengembangan E-Government													149.5	
59	08	3030		Tersedianya peraturan perundangan dan tata kelola sistem dan transaksi elektronik dan Penetapan E-Gov nasional												19.9	
59	08	3030			Persentase (%) dokumen Masterplan, Blueprint & Arsitektur e-Government Nasional	30% (MP)	50% (Arsitektur)	75% (Blueprint)	90% (Standarisasi)	100% (Standarisasi)							
59	08	3030			Jumlah produk regulasi/kebijakan di bidang e-Government (Kelembagaan, SDM, Infrastruktur, Aplikasi Tata Kelola) Note: Include: NCIO	1	3	3	3	3							
59	08	3030		Tersedianya layanan eGovernment yang terintegrasi untuk 10% kabupaten dan kota dengan Index eGovernment mencapai 3,4 (skala 4,0);												129.6	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
59	08	3030			Indeks PeGI 3,4 bagi Lembaga Negara/Pemerintah yang memberikan Layanan Publik daring (dalam jaringan) pada tahun 2019	2.8	2.9	3,0	3.2	3.4							
59	08	3030			Persentase (%) integrasi layanan eGovernment pada skala G2G, G2B, G2C, G2E dan E2E dan terstandarisasi nasional	15%	30%	50%	75%	90%							
59	08	3030			Persentase (%) instansi yang memanfaatkan infrastruktur dan teknologi eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional	10%	20%	50%	75%	100%							
059	08	3031	Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika													156.9	
059	08	3031		Terwujudnya ekosistem industri TIK yang berorientasi lingkungan (green IT)												156.9	
059	08	3031			Jumlah peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemberdayaan industri TIK	2 (termasuk Permen tentang Indonesia Game Rating System (IGRS))	1	2	2	2							
059	08	3031			Jumlah Pusat Industri Berbasis TIK di Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi	Dokumen Kriteria Pemilihan 5 Pusat Industri berbasis TIK	1 Pusat Industri TIK 1	1 Pusat Industri TIK 2 & 3 dan maintenance/o perasional Pusat Industri TIK 1	1 Pusat Industri TIK 4 dan maintenance/o perasional Pusat Industri TIK 1, 2, 3	1 Pusat Industri TIK 5 dan maintenance/o perasional Pusat Industri TIK 1, 2, 3, 4							
059	08	3031			Persentase (%) penyusunan blueprint dan peta ekosistem industri berbasis TIK Indonesia	25%	50%	100%									
059	08	3031			Jumlah inkubator bisnis TIK dan startup digital yang menjadi bisnis berkelanjutan	1 startup	1 startup	1 inkubator dan 2 startup	1 inkubator dan 2 startup	1 inkubator dan 2 startup							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	08	3031			Jumlah kegiatan pemanfaatan, promosi dan fasilitasi produk dan jasa TIK	3	8	9	9	8							
059	08	3032	Pembinaan dan Pengembangan TIK Untuk Pemberdayaan Masyarakat													83.8	
059	08	3032		Tersedianya dukungan TIK untuk percontohan proyek rusunawa serta dukungan TIK untuk desa nelayan dan pertanian												24.0	
059	08	3032			Jumlah prototipe aplikasi untuk pengelolaan rusunawa	1	1	1	1	1							
059	08	3032			Jumlah pendampingan untuk penguatan masyarakat dalam bentuk edukasi dan pendayagunaan sistem aplikasi Rusunawa	5	10	10	10	10							
059	08	3032			Jumlah prototype pangkalan akses masyarakat yang memberdayakan Sistem Informasi Desa atau Sistem Informasi Rusunawa	5	10	10	10	10							
059	08	3032			Jumlah desa yang memberdayakan sistem informasi Desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa yang bersifat One Stop Services berbasis open source	1000 (- Tersedianya aplikasi SIDEKA dengan fitur profil desa, data kependudukan, dan tata kesehatan - Terimplementasikannya aplikasi SIDEKA di 1000 desa)	12	12	12	12							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	08	3032		Meningkatnya kemampuan TIK masyarakat melalui internet cerdas, kreatif, dan produktif (INCAKAP) dengan dukungan relawan TIK yang memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel), pemuda dan responsif gender											59.8		
059	08	3032			Jumlah provinsi, kabupaten dan kota yang telah dibentuk Relawan TIK	5	6	6	6	6							
059	08	3032			Jumlah penguatan dan pembuatan purwarupa fasilitas umum untuk Internet Boat CAP dan M-CAP		2	2	2	2							
059	08	3032			Jumlah agen perubahan Internet Cerdas Kreatif Produktif	1,500	500	500	500	500							
059	08	3032			Jumlah konten/situs/blog audio dan video yang tercipta hasil dari pemberdayaan informatika	100	110	120	130	140							
059	08	3032			Jumlah karya anak bangsa berupa aplikasi dan konten di ajang kompetisi TIK skala nasional (INACTA) dan internasional	800	850	900	950	1,000							
059	08	3032			Jumlah masyarakat yang mengikuti peningkatan pemberdayaan TIK bagi responsif gender, pemuda, dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	600	500	500	500	500							
059	08	3032			Jumlah peraturan perundangan di bidang Pemberdayaan Informatika	1	1	1	1	1							
059	08	3033	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi												128.9		

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	08	3033		Terselenggaranya Sistem Elektronik secara aman, andal dan bertanggung jawab											128.9		
059	08	3033			Jumlah layanan publik yang memanfaatkan tandatangan digital	0	5	5	10	10							
059	08	3033			Jumlah kebijakan/regulasi Keamanan Informasi yang disusun		3	3	3	3							
059	08	3033			Jumlah Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Publik yang mengikuti Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi	60	60	60	60	60							
059	08	3033			Jumlah PSrE yang beroperasi	2	2	2	2	2							
059	08	3033			Jumlah Tim Penanganan Insiden yang terbentuk	1	1	1	1	1							
059	08	3033			Jumlah kasus yang terselesaikan	7	7	7	7	7							
059	08	3034	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika												82.0		
059	08	3034		Tersedianya peraturan perundangan bidang aplikasi informatika											82.0		
059	08	3034			Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Rancangan UU tentang perubahan UU ITE	50%	75%	100%									
059	08	3034			Persentase (%) penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata Cara Intersepsi	20%	40%	60%	80%	100%							
059	08	3034			Persentase (%) penyusunan RPP PDES	50%	100%										
059	08	3034			Jumlah Peraturan Menteri	2	1	1									

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	08	3034			Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan, penelaahan hukum, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan; jumlah laporan tahunan, keuangan yang sesuai SAI, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja; Jumlah sarana dan prasarana perkantoran; SDM; termasuk belanja pegawai												
059	04		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												821.9		
059	04			Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian													
059	04			Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian terkait broadband, internet, digitalisasi dan lain-lain	30% (dari 20 penelitian/kajian)	30%	30%	30%	30%								
059	04			Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika	0	2	2	2	2								
				Jumlah kajian opini & kebutuhan informasi masyarakat di daerah	8	8	8	8	8								
059	04			Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika													

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	04				Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah	1750	1650	1950	2050	2150							
059	04				Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda	7575	1250	1450	1450	1450							
059	04				Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri	225	230	250	300	325							
059	04				Jumlah mahasiswa STMM	1813	1979	2179	2379	2579							
059	04				Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo	4	4	4	4	4							
059	04				Akselerasi peningkatan literasi nasional												
059	04				Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas	2500	4100	5100	6100	7100							
059	04	3035	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi BBPPKI													64.3	
059	04	3035		Tersedianya kajian dan model pembangunan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan dan regulasi												35.6	
059	04	3035			Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan	4	4	4	4	4							
059	04	3035			Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika	1	2	2	2	2							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	04	3035			Jumlah kajian opini & kebutuhan informasi masyarakat di daerah	2	2	2	2	2							
059	04	3035		Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika											28.7		
059	04	3035			Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah	250	400	500	600	700							
					Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda	1570	0	0	0	0							
				Meningkatnya kualitas kelembagaan litbang													
					Jumlah jurnal yang terakreditasi/terpelihara status akreditasinya	2	2	2	2	2							
					Jumlah pranata litbang yang terakreditasi/terpelihara status akreditasinya	2	2	2	2	2							
059	04	3036	<u>Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi BPPKI</u>												60.1		
059	04	3036		Tersedianya kajian dan model pembangunan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan dan regulasi											53.6		
059	04	3036			Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan	12	12	12	12	12							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	04	3036			Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika	3	6	6	6	6							
059	04	3036			Jumlah kajian opini & kebutuhan informasi masyarakat di daerah	4	6	6	6	6							
059	04	3036		Meningkatnya Literasi TIK Nasional											6.5		
059	04	3036			Jumlah peserta bimtek literasi TIK bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas	0	350	400	500	600							
				Meningkatnya kualitas kelembagaan litbang													
					Jumlah jurnal yang terakreditasi/terpelihara status akreditasinya	6	6	6	6	6							
					Jumlah pranata litbang yang terakreditasi/ terpelihara status akreditasinya	1	2	6	6	6							
059	04	3037	<u>Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta</u>												<u>181.7</u>		
059	04	3037		Terselenggaranya pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan Teknis											181.7		
059	04	3037			Jumlah Mahasiswa	1813	1979	2179	2379	2579							
059	04	3037			Jumlah Laporan Penelitian	15	30	45	60	75							
059	04	3037			Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	706	12	18	24	30							
059	04	3037			Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi	19	21	23	25	27							
					Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda												

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	04	3039	Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika												288.9		
059	04	3039		Tersedianya Kajian bagi formulasi kebijakan bidang Literasi Profesi											9.0		
059	04	3039			Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan	5	4	4	4	4							
059	04	3039		Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika											274.3		
059	04	3039			Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah	1000	750	750	750	750							
059	04	3039			Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda	3,070	750	750	750	750							
059	04	3039			Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri	225	230	250	300	325							
059	04	3039			Jumlah regulasi SKKNI Bidang Kominfo	4	4	4	4	4							
059	04	3039		Meningkatnya Literasi TIK Nasional											5.6		
059	04	3039			Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas	500	500	500	500	500							
059	04	3038	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik												23.1		
059	04	3038		Tersedianya Kajian bagi formulasi kebijakan bidang APTIKA IKP											23.1		

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	04	3038			Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan	5	4	4	4	4							
059	04	3038			Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika	0	1	1	1	1							
				Meningkatnya kualitas kelembagaan litbang													
					Jumlah jurnal yang terakreditasi/terpelihara status akreditasinya	1	1	1	1	1							
					Jumlah pranata litbang yang terakreditasi/terpelihara status akreditasinya	0	1	1	1	1							
<u>059</u>	<u>04</u>	<u>3040</u>	<u>Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika</u>													<u>31.6</u>	
059	04	3040		Tersedianya Kajian bagi formulasi kebijakan bidang PPI												31.6	
059	04	3040			Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan	5	4	4	4	4							
059	04	3040			Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika	0	1	1	1	1							
				Meningkatnya kualitas kelembagaan litbang													
					Jumlah jurnal yang terakreditasi/terpelihara status akreditasinya	1	1	1	1	1							
					Jumlah pranata litbang yang terakreditasi/terpelihara status akreditasinya	0	1	1	1	1							
<u>059</u>	<u>04</u>	<u>3041</u>	<u>Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</u>													<u>31.8</u>	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	04	3041		Tersedianya Kajian bagi formulasi kebijakan bidang SDPPI											31.8		
059	04	3041			Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan	5	4	4	4	4							
059	04	3041			Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika	0	1	1	1	1							
				Meningkatnya kualitas kelembagaan litbang													
					Jumlah jurnal yang terakreditasi/terpelihara status akreditasinya	1	1	1	1	1							
					Jumlah pranata litbang yang terakreditasi/terpelihara status akreditasinya	1	1	1	1	1							
059	04	3043	<u>Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi</u>												73.2		
059	04	3043		Meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM bidang Komunikasi dan Informatika											45.5		
059	04	3043			Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda	2285	500	700	700	700							
059	04	3043			Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah	500	500	700	700	700							
059	04	3043		Meningkatnya Literasi TIK Nasional											27.7		
059	04	3043			Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas	2000	3250	4200	5100	5900							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	04	3042	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Litbang SDM												67.2		
059	04	3042		Terselenggaranya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Litbang SDM		12	12	12	12	12					67.2		
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama	9	9	9	9	9							
					Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan perbendaharaan	6	6	6	6	6							
					Jumlah Dokumen Layanan Kerumahtangaan, Ketatausahaan, dan Pengelolaan Aset BMN	6	6	6	6	6							
					Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi dan Organisasi Tata Laksana	9	9	9	9	9							
059	09		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												775.5		
059	09			Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik													
059	09			Jumlah Regulasi dasar untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik	6	5	5	5	6								
059	09			Jumlah Lembaga Sosial yang Menerima Konten Informasi	100	200	300	400	500								
059	09			Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi	60%	70%	80%	90%	100%								

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	09				Persentase (%) tingkat pertumbuhan industri konten berbasis edukasi	15%	10%	10%	10%	10%							
059	09				Persentase (%) masyarakat daerah yang melek informasi	20%	30%	40%	50%	60%							
059	09			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik													
059	09				Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik	70%	90%	90%	90%	90%							
059	09				Persentase (%) Kerjasama dan Kemitraan yang efektif dalam rangka penyebaran informasi publik	40%	50%	60%	70%	80%							
059	09				Persentase (%) SDM Pranata Humas yang bersertifikasi/sesuai standar	20%	30%	40%	50%	60%							
				Meningkatnya partisipasi publik dan citra positif pemerintah													
					Jumlah regulasi terkait implementasi GPR	5 regulasi											
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik oleh K/L/D	50%											
					Indeks kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah	50%											
				Tersebaranya Informasi Publik Terkait Kampanye Revolusi Mental													
					Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental di 1200 kecamatan	2 kebijakan											
					Persentase (%) penyampaian pesan Kampanye Nasional Revolusi Mental kepada masyarakat di 1200 kecamatan	90%											

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
					Persentase (%) lembaga penyiaran publik yang menyediakan slot untuk tayangan Kampanye Revolusi Mental	90%											
					Jumlah Dokumen Kerjasama kelembagaan	32 Dok											
					Jumlah konten informasi startegis berdasarkan Fokus Pembangunan Indonesia di 1200 Kecamatan	30 Jenis											
					Prosentase (%) penyebaran informasi kepada K/L/D, ormas dan Media	?											
				Tersusunnya Strakom, produksi konten diseminasi berdasarkan Fokus pembangunan Indonesia di Lembaga Penyiaran													
					Jumlah materi kebijakan publik	12 materi											
					Pelaksanaan GPR	7 K/L/Prov/Kab/Kot											
059	09	3044	Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional												92.4		
059	09	3044		Terselenggaranya Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional											29.5		
059	09	3044			Jumlah kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik	7 kebijakan (Peta jejaring komunikasi, 3 regulasi tentang GPR)	7 kebijakan	7 kebijakan	7 kebijakan	7 kebijakan							
059	09	3044		Terselenggaranya Pembinaan SDM untuk Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Nasional											25.3		
059	09	3044			Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkatkan Kompetensi dan kualitasnya	200 orang	500 orang	700 orang	800 orang	1000 orang							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	09	3044			Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang							
059	09	3044		Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pengambilan kebijakan											36.5		
059	09	3044			Jumlah SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata kelolanya di bidang informasi dan komunikasi publik	102 SKPD provinsi	150 SKPD provinsi	150 SKPD provinsi	150 SKPD provinsi	150 SKPD provinsi							
059	09	3044			Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP	2000	3500	3500	3500	3500							
059	09	3044		Tersusunnya Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA											1.0		
					Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA	1	-	-	-	-						Quickwins	
059	09	3045	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi												108.9		
059	09	3045		Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI											104.8		

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	09	3045			Jumlah analisis bidang polhukam, perekonomian, kesra dan kemaritiman sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan	300	300	300	300	300							
059	09	3045			Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal dan pasca konflik)	24	30	30	30	30							
059	09	3045			Jumlah kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi	2	2	2	2	2							
059	09	3046	Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik														222.3
059	09	3046		Terlaksananya Peningkatan Peran Media Publik													164.3
059	09	3046			Jumlah Media Publik (termasuk media center) yang diperkuat	180	180	180	180	180							
059	09	3046			Jumlah Pembangunan dan penguatan Media Center lengkap dan berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah terluar/Terdepan/Pasca Konflik.	35	35	35	35	35							
059	09	3046			Jumlah Kendaraan Pusat Teknologi Informasi Komunitas (M-Pustika) sebagai penyebaran informasi di daerah terluar, terdepan, tertinggal dan pasca konflik	10	10	10	10	10							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	09	3046			Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia	18	18	18	18	18							
059	09			Terbangunnya proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap di 1200 kecamatan												58,0	
					Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1.200 kecamatan	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental							
					Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk menciptakan awareness/berpartisipasi /menonton film terkait revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1.200 kecamatan	1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan advokasi kampanye revolusi mental	1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan advokasi kampanye revolusi mental	1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan advokasi kampanye revolusi mental	1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan advokasi kampanye revolusi mental	1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan advokasi kampanye revolusi mental							
059	09				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi kampanye revolusi mental	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan							quickwins
					Terselenggaranya Sosialisasi konten informasi strategis berdasarkan Fokus Pembangunan Indonesia di 1200 Kecamatan												
					Jumlah Kerjasama dengan lembaga dalam rangka diseminasi informasi revolusi mental	35 Mou											

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	09	3047	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi												104.3		
059	09	3047		Terselenggaranya Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk penyebaran/diseminasi informasi publik											104.3		
059	09	3047			Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan SKPD/OPD	30 SKPD/OPD	50 SKPD/OPD	65 SKPD/OPD	75 SKPD/OPD	80 SKPD/OPD							
059	09	3047			Jumlah kemitraan dalam rangka penguatan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan							
059	09	3047			Jumlah peserta forum edukasi literasi media untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya	1.000 peserta	1.000 peserta	1.000 peserta	1.000 peserta	1.000 peserta							
059	09	3047			Jumlah Pemberdayaan Media Komunitas (terutama daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik) sebagai penyebar informasi publik kepada masyarakat	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	09	3047			Pemberdayaan Forum Komunikasi Media Tradisional dalam upaya meningkatkan kualitas media tradisional dalam penyebaran informasi publik, mempertahankan nilai nilai budaya dan merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi							
059	09	3047			Jumlah pemberdayaan Kelompok informasi masyarakat (terutama daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik)	10 kab/kota	15 Kab/Kota	20 Kab/Kota	25 Kab/Kota	30 Kab/Kota							
059	09	3048	Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional													91.6	
059	09	3048		Terselenggaranya Kemitraan dengan Lembaga dan Institusi Internasional dalam rangka pencitraan positif negara Indonesia di Dunia Internasional												88.2	
059	09	3048			Jumlah masyarakat Indonesia penerima informasi di LN	800 orang	800 orang	800 orang	800 orang	800 orang							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	09	3048			Jumlah kemitraan dan layanan informasi internasional dengan perwakilan negara asing dan lembaga internasional	2 kemitraan, 3 judul	2 kemitraan, 3 judul	2 kemitraan, 3 judul	2 kemitraan, 3 judul	2 kemitraan, 3 judul							
059	09	3048			Jumlah kemitraan dengan media asing	10 kemitraan	10 kemitraan	10 kemitraan	10 kemitraan	10 kemitraan							
059	09	3048			Jumlah Publikasi konten di media internasional tentang citra positif Indonesia	5 judul	5 judul	5 judul	5 judul	5 judul							
059	09	3048		Tersedianya Kebijakan Layanan informasi internasional dalam rangka pencitraan positif Indonesia											3.4		
059	09	3048			Jumlah perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi internasional.	1	1	1	1	1							
059	09	3049	<u>Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Pers</u>												16.2		
059	09	3049		Terlaksananya Pelayanan Informasi Masyarakat Melalui Monumen Pers Nasional											16.2		
059	09	3049			Jumlah layanan administrasi dan dukungan teknis	12	12	12	12	12							
059	09	3049			Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional	10,000	12,000	14,000	16,000	16,000							
059	09	3049			Jumlah Event Penyebaran Informasi mengenai Koleksi Monumen Pers Nasional	9	9	9	9	9							
059	09	3049			Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	50	50	50	50	50							
059	09	3049			Jumlah Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Laporan	6	6	6	6	6							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	09	3049			Jumlah Pemetaan Benda Pers dan Terpeliharanya Koleksi Monumen Pers Nasional	12	12	12	12	12							
059	09	3050	Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi													15.5	
059	09	3050		Terlaksananya Pelestarian Benda Budaya/Bersejarah dan Pelayanan Informasi Masyarakat Melalui Museum Penerangan												15.5	
059	09	3050			Jumlah layanan administrasi dan dukungan teknis	12	12	12	12								
059	09	3050			Jumlah Pengunjung Museum Penerangan	15000	16000	17000	18000								
059	09	3050			Jumlah Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Penerangan	40	40	40	40								
059	09	3050			Jumlah Koleksi Baru yang Dapat Ditampilkan	4	5	5	6								
059	09	3051	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik													124.4	
059	09	3051		Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik												124.4	
059	09	3051			Tersusunnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Penyempurnaan draft RUU	Pembahasan RUU di DPR	Pembahasan RUU di DPR	Penetapan UU	Sosialisasi							
059	09	3051			Jumlah Dokumen Perencanaan yang Jelas dan Terukur	4	4	4	4	4							
059	09	3051			Jumlah Dokumen Pendukung Penerapan Reformasi Birokrasi	4	4	4	4	4							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	09	3051			Jumlah Fasilitas Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Kerjasama	3	3	3	3	3							
059	09	3051			Jumlah Dokumen Kerjasama	3	3	3	3	3							
059	09	3051			Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan peraturan perundang-undangan lainnya	3	3	3	3	3							
059	09	3051			Jumlah Dokumen Movev Program dan Kegiatan dan Laporan Kinerja	5	5	5	5	5							
059	09	3051			Jumlah tata kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik	5	5	5	5	5							
059	09	3051			Prosentase SDM Ditjen IKP yang taat peraturan kepegawaian	80	85	90	95	100							
059	09	3051			Jumlah ketersediaan layanan dan sarana perkantoran sesuai kebutuhan	12	12	12	12	12							
059	09	3051			Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	50	50	50	50	50							
059	09	3051			Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	50	50	50	50	50							
					Jumlah Pelayanan informasi peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika												
059	01		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN LAYANAN TEKNIS LAINNYA													955.2	
				Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika													

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
					Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	75	80	85	90	90							
					Persentase (%) pencapaian Index Pemingkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional	100%	100%	100%	100%	100%							
					Skor penerapan SAKIP Kemkominfo yang efektif dan efisien berbasis TIK	B											
					Persentase (%) tersedianya Kebijakan Change Management	100%											
					Persentase (%) realisasi anggaran yang sesuai dengan disbursement plan (<i>internal control mechanism</i>)	100%											
					Persentase (%) tersedianya sisten dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, Design, execution, dan monitoring) anggaran dan kebijakan	100%											
059	01	3011	Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan, Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika													39.6	
059	01	3011		Terlaksananya perumusan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan evaluasi produk hukum dan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika												39.6	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	01	3011			Persentase (%) draft/rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sesuai ketentuan hukum dan disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
059	01	3011			Persentase (%) penanganan dan penyelesaian kasus hukum	100%	100%	100%	100%	100%							
059	01	3011			Persentase (%) hasil monitoring, evaluasi dan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika	100%	100%	100%	100%	100%							
059	01	3012	<u>Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika</u>													77.4	
059	01	3012		Terlaksananya peningkatan Pengelolaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika												77.4	
059	01	3012			Jumlah Dokumen Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Tertentu	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok							
059	01	3012			Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok							
059	01	3012			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok							
059	01	3012			Jumlah Dokumen Mutasi dan Penyelesaian Permasalahan Kpegawaian	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok							
059	01	3012			Jumlah Dokumen Penerapan Reformasi Birokrasi	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	01	3013	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika												142.7		
059	01	3013		Terlaksananya peningkatan pembinaan pengelolaan Keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara											142.7		
059	01	3013			Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.							
059	01	3013			Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan Barang/Jasa yang berhasil diselesaikan	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.							
059	01	3013			Jumlah Laporan PNB dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	01	3013			Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.							
059	01	3014	<u>Koordinasi</u> <u>Penyusunan Program,</u> <u>Kegiatan dan</u> <u>Anggaran,</u> <u>Lintas Sektoral dan</u> <u>Daerah serta Evaluasi</u> <u>dan Laporan</u> <u>Kementerian</u> <u>Komunikasi dan</u> <u>Informatika</u>													55.8	
059	01	3014		Tersusunnya perencanaan program, anggaran, lintas sektor dan daerah serta terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku												55.8	
059	01	3014			Persentase (%) terselesaikannya Dokumen Perencanaan Program, Anggaran, Lintas Sektor dan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							
059	01	3015	<u>Koordinasi</u> <u>Pembinaan dan</u> <u>Pengelolaan</u> <u>Administrasi,</u> <u>Pengadaan</u> <u>Barang/Jasa serta</u> <u>Pelayanan Penunjang</u> <u>Pelaksanaan Tugas</u> <u>Kementerian</u> <u>Komunikasi dan</u> <u>Informatika</u>													92.0	
059	01	3015		Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga serta Persuratan dan Kearsipan Kementerian yang Efektif dan Efisien												92.0	

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	01	3015			Persentase (%) Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan yang tepat sasaran dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
059	01	3015			Persentase (%) Layanan rumah tangga dan tata usaha Sekretariat Jenderal yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
059	01	3015			Jumlah pembinaan/bimtek penataan surat menyurat dan kearsipan	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali							
059	01	3015			Jumlah laporan perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pelaporan sarana dan prasarana pelayanan internal Kementerian	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen							
059	01	3016	Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika													82.1	
059	01	3016		Terlaksananya Layanan Penyediaan Data dan Informasi yang Transparan dan Akuntabel												82.1	
059	01	3016			Persentase (%) Ketersediaan Informasi dan Layanan Kementerian Kominfo yang dapat diakses oleh pengguna web	100%	100%	100%	100%	100%							
059	01	3016			Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kominfo serta peningkatan nilai Pegi Kemkominfo	80%	90%	100%	100%	100%							
059	01	3016			Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian	98%	98%	98%	98%	98%							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	01	3017	<u>Pelayanan Informasi, Promosi, Penyeediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika</u>												46.2		
059	01	3017		Terlaksananya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Efektif dan Efisien											46.2		
059	01	3017			Jumlah promosi dan publikasi kepada publik secara langsung dan melalui media	260 kali	285 kali	310 kali	360 kali	360 kali							
059	01	3017			Persentase (%) tanggapan atas permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kominfo	96%	96%	96%	97%	97%							
059	01	3017			Jumlah dokumen hasil analisa isu publik yang berkaitan dengan Kementerian Kominfo	12 kali	12 kali	24 kali	24 kali	24 kali							
059	01	3017			Jumlah hasil peliputan dalam bentuk berita, foto dan video kegiatan kementerian yang dipublikasikan melalui Kerjasama media	10 kali	10 kali	15 kali	20 kali	25 kali							
059	01	3018	<u>Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika</u>												59.1		
059	01	3018		Terlaksananya Layanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerjasama Nasional Maupun Internasional Bidang Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien											59.1		

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	01	3018			Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang multilateral yang berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%							
059	01	3018			Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang regional yang berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%							
059	01	3018			Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang bilateral yang berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%							
059	01	3019	<u>Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika</u>													52.5	
059	01	3019		Terlaksananya peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan pegawai												52.5	
059	01	3019			Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dalam lingkup Kementerian	28	30	31	33	35							
059	01	3019			Jumlah Peserta Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis	612	646	681	719	758							
059	01	3020	<u>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi Pusat</u>													83.6	
059	01	3020		Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi (KI) Pusat													
059	01	3020			persentase (%) layanan administrasi dan dukungan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi	100%	100%	100%	100%	100%							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	01	3020		Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik													
059	01	3020			Persentase (%) penyelesaian sengketa informasi publik	55%	60%	65%	65%	65%							
059	01	3020			Persentase (%) Badan Publik yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	60%	65%	70%	75%	80%							
					Persentase (%) Fasilitas pembentukan Komisi Informasi Provinsi	80%	100%	100%	100%	100%							
059	01	3021	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat													120.7	
059	01	3021		Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas KPI Pusat												120.7	
059	01	3021			Persentase (%) Pengaduan masalah konten siaran yang terselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%							
059	01	3021			Jumlah pemantauan langsung isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran	15 TV Berjaringan + 4 TV Berlangganan+ 20 Radio	15 TV Berjaringan + 4 TV Berlangganan+ 20 Radio	15 TV Berjaringan + 4 TV Berlangganan+ 20 Radio	15 TV Berjaringan + 4 TV Berlangganan+ 20 Radio	15 TV Berjaringan + 4 TV Berlangganan+ 20 Radio							
059	01	3021			Persentase (%) tindak lanjut pelayanan proses perizinan penyiaran sesuai kewenangan KPI	80%	80%	80%	80%	80%							
059	01	3021			Pelaksanaan Pemeriksaan (rating) Penyiaran Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
059	01	3021			Pengembangan Sistem Manajemen Informasi KPI	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	01	3022	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers												89.6		
059	01	3022		Terselenggara Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat terhadap kasus-kasus pers dan layanan Keterangan Ahli Dewan Pers											0.0		
059	01	3022			Prosentase fasilitasi pengaduan bidang pers yang terselesaikan	90%	92%	94%	96%	98%							
059	01	3022		Terselenggaranya Layanan operasional Administrasi Perkantoran dan program kegiatan Dewan Pers											0.0		
059	01	3022			Jumlah program kegiatan peningkatan peran Dewan Pers	17 program	17 program	17 program	17 program	17 program							
059	01	3022			Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	1 Dokumen Kajian	Pelaksanaan Indeks Kemerdekaan Pers	Pelaksanaan Indeks Kemerdekaan Pers	Pelaksanaan Indeks Kemerdekaan Pers	Pelaksanaan Indeks Kemerdekaan Pers							
059	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												205.0		
059	01	3023	Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika												205.0		
059	01	3023		Terlaksananya Rehabilitasi Gedung dan Renovasi Biro Umum Sarana dan Prasarana											205.0		
059	01	3023			Luas renovasi gedung dan renovasi ruang kerja gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika	8315 m2 (luas lantai dan kulit luar)	3.960 m2 (Renovasi IKMN)	10.000 m2	15.000 m2	20.000 m2							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMINFO												85.0		
059	03			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kominfo													
					Skor tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3											
				Meningkatnya peran aktif fungsi Itjen dalam mendukung pencapaian program-program pemerintah di Kominfo dengan menerapkan sistem Audit Internal yang mengedepankan pengawasan yang proaktif mengidentifikasi potensi terjadinya praktik-praktik yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, kecurangan dan korupsi													
059	03				Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
059	03				Capaian Indeks Perilaku Korupsi dari KPK				65								
059	03				Penilaian LAKIP Kemkominfo	B	B	BB	A	A							
					Skor tingkat kapabilitas APIP	3											
059	03	3024	<u>Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI)</u>												13.7		
059	03	3024		Capaian Indeks Persepsi Korupsi pada Ditjen SDPPI											2.2		

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	03	3024			Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi	90%	90%	95%	95%	100%							
059	03	3024			Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks penerapan budaya anti korupsi	60%	60%	75%	85%	100%							
059	03	3024			Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan pengaduan masyarakat	90%	90%	95%	95%	95%							
059	03	3024			Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks kepatuhan penyampaian LHKPN	90%	90%	95%	95%	95%							
059	03	3024		Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kualitas LK pada Ditjen SDPPI											8.0		
059	03	3024			Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan keuangan dan aset yang material	57%	57%	71%	86%	100%							
059	03	3024			Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti	90%	90%	95%	95%	95%							
059	03	3024		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Ditjen SDPPI											3.5		
059	03	3024			Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di Lingkungan Ditjen SDPPI	B	B	BB	A	A							
059	03	3025	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI)												8.3		
059	03	3025		Capaian Indeks Persepsi Korupsi pada Ditjen PPI											2.2		

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	03	3025			Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi	90%	90%	95%	95%	100%							
059	03	3025			Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks penerapan budaya anti korupsi	60%	60%	75%	85%	100%							
059	03	3025			Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan pengaduan masyarakat	90%	90%	95%	95%	95%							
059	03	3025			Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks kepatuhan penyampaian LHKPN	90%	90%	95%	95%	95%							
059	03	3025		Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kualitas LK pada Ditjen PPI											0.6		
059	03	3025			Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan keuangan dan aset yang material	57%	57%	71%	86%	100%							
059	03	3025			Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti	90%	90%	95%	95%	95%							
059	03	3025		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Ditjen PPI											5.5		
059	03	3025			Nilai evaluasi LAKIP pada Satker di lingkungan Ditjen PPI	B	B	BB	A	A							
059	03	3026	<u>Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dan Ditjen Aplikasi Informatika (IKP dan Aptika)</u>												5.7		
059	03	3026		Capaian Indeks Persepsi Korupsi pada Ditjen IKP dan Ditjen Aptika											2.2		

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	03	3026			Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi	90%	90%	95%	95%	100%							
059	03	3026			Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks penerapan budaya anti korupsi	60%	60%	75%	85%	100%							
059	03	3026			Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan pengaduan masyarakat	90%	90%	95%	95%	95%							
059	03	3026			Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks kepatuhan penyampaian LHKPN	90%	90%	95%	95%	95%							
059	03	3026		Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kualitas LK pada Ditjen IKP dan Ditjen Aptika												0.5	
059	03	3026			Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan keuangan dan aset yang material	57%	57%	71%	86%	100%							
059	03	3026			Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti	90%	90%	95%	95%	95%							
059	03	3026		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Ditjen IKP dan Ditjen Aptika												3.0	
059	03	3026			Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di lingkungan Ditjen IKP dan Ditjen Aptika	B	B	BB	A	A							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	03	3027	<u>Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Litbang SDM dan Inspektorat Jenderal (Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen).</u>												8.4		
059	03	3027		Capaian Indeks Persepsi Korupsi pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen											2.2		
059	03	3027			Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi	90%	90%	95%	95%	100%							
059	03	3027			Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks penerapan budaya anti korupsi	60%	60%	75%	85%	100%							
059	03	3027			Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan pengaduan masyarakat	90%	90%	95%	95%	95%							
059	03	3027			Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks kepatuhan penyampaian LHKPN	90%	90%	95%	95%	95%							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	03	3027		Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kualitas LK pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen											5.0		
059	03	3027			Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan keuangan dan aset yang material	57%	57%	71%	86%	100%							
059	03	3027			Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti	90%	90%	95%	95%	95%							
059	03	3027		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen											1.2		
059	03	3027			Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di lingkungan Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen	B	B	BB	A	A							
059	03	3028	<u>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal</u>												48.8		
059	03	3028		Terlaksananya layanan administrasi Inspektorat Jenderal											36.0		
059	03	3028			Prosentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pengawasan yang telah direncanakan	85%	85%	90%	95%	95%							
059	03	3028			Prosentase laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan kegiatan yang diadministrasikan	85%	85%	90%	95%	95%							

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	03	3028		Terwujudnya aparat pengawasan internal yang kredibel, profesional, dan mampu memberikan nilai tambah untuk mencapai tujuan dan sasaran pemangku kepentingan											12.8		
059	03	3028			Prosentase aparat pengawasan lulus sertifikasi auditor	25%	35%	50%	75%	85%							
059	03	3028			Prosentase auditor yang mengikuti bimtek dan diklat penunjang pelaksanaan pengawasan	60%	65%	75%	85%	95%							
059	03	3028			Prosentase auditor yang memiliki sertifikat keahlian khusus di bidang pengawasan	10%	15%	25%	30%	40%							

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA

ttd

RUDIANTARA